

PRAKTIK BAIK SDGs DESA

Studi Kesetaraan Gender, Pelindungan dan
Pemberdayaan Perempuan di 10 Desa

Yanu Endar Prasetyo, Dkk

2022



PRAKTIK BAIK SDGS DESA

Studi Kesetaraan Gender, Pelindungan dan Pemberdayaan Perempuan di 10 Desa

Diterbitkan oleh:



Kerjasama dengan:



KONSORSIUM TIMOR ADIL DAN SETARA (KTAS)



Lopo Belajar Gender

2022

PRAKTIK BAIK SDGs DESA

Studi Kesetaraan Gender, Pelindungan dan Pemberdayaan Perempuan di 10 Desa

Penulis utama:

Yanu Endar Prasetyo

Penulis:

Bona Tua Parlinggomon Parhusip

Denisa Amelia Kawuryan

Hegel Terome

Listyowati

Tim Enumerator 10 Desa:

Castra Aji Sarosa

Dian Ekawati

Dody Kolo

Gina Lestari

Ismi Malihatun Nasihah

Jemry Liunokas

Joko Sulistyono

Stefanus Kou

Suhupawati

Tymu Irawan

Editor:

Grace Joanessa K. Putri

Sampul dan Tata Letak:

Galih Gerryaldi

Ukuran 210mm X 297mm

Jumlah Halaman 70 Halaman + Cover

Diterbitkan oleh:

International NGO Forum on Indonesian Development

Alamat:

Jl. Jati Padang Raya Kav.3 No.105, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540 - Indonesia

Phone (62-21) 781 9734, 781 9735, 7884 0497

Email: office@infid.org

Laman: www.infid.org

Cetakan Pertama, Juli 2022

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR ISTILAH	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
PRAKTEK BAIK SDGs DESA: KUMPULAN KISAH SUKSES DAN PEMBELAJARAN DALAM IMPLEMENTASI SDGs	viii
PENDAHULUAN	1
LATAR BELAKANG	1
Dari MDGs ke SDGs	2
Menenal SDGs Desa	3
Implementasi SDGs Desa	4
METODOLOGI	6
SDGs Desa dan Kesetaraan Gender	6
Evaluasi SDGs Desa	8
TEMUAN DAN PEMBAHASAN	15
Desa Berjuang Melawan Stunting	15
Upaya Desa Menurunkan Kekerasan Berbasis Gender (KBG)	21
Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak	21
Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)	26
Perlindungan Perempuan Pekerja Migran	30
Menjaga dan Menumbuhkan Toleransi Dari Desa	34
Merawat Kerukunan Melalui “Desa Pancasila”	35
Mendorong Kesetaraan Gender Dari Desa	37
Pemberdayaan Perempuan dan Mimpi Desa Tanpa Kemiskinan	42
REFLEKSI KRITIS	48
LAMPIRAN	50
DAFTAR PUSTAKA	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ragam indeks untuk mengukur kesetaraan Gender	7
Tabel 2. Tipe desa berdasarkan SDGs Desa	9
Tabel 3. Jumlah peserta FGD SDGs Desa di sepuluh desa	13
Tabel 4. Tipe desa, tujuan, dan indikator SDGs Desa (kuantitatif)	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Suasana FGD Penggalan Data di Desa Kuanek	10
Gambar 2. Suasana FGD pengumpulan data di Desa Ajaobaki	11
Gambar 3. Pendekatan kualitatif untuk memahami implementasi SDGs Desa	12
Gambar 4. Lurah Banjararum bersama ibu dan balita di Pos Gizi	17
Gambar 5. Pemberian Makanan Tambahan untuk Anak Gizi Kurang di Banjararum	18
Gambar 6. Suasana penimbangan berat badan balita di Banjararum	19
Gambar 7. Ketua Paralegal Desa Kuanek, TTU	22
Gambar 8. Anggota Paralegal Desa Kuanek, TTU	23
Gambar 9. LLB di Desa Kuanek	24
Gambar 10. Kegiatan perempuan di Kelurahan Banjarharjo	28
Gambar 11. Suasana pelatihan untuk perempuan di Kelurahan Banjarharjo	29
Gambar 12. FGD penggalan data di Babakan Gebang	31
Gambar 13. Diskusi di Desa Pogung Raharjo	34
Gambar 14. FGD di Desa Oesena	45

DAFTAR ISTILAH

ADD	: Alokasi Dana Desa
BLT	: Bantuan Langsung Tunai
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
DD	: Dana Desa
DRPPA	: Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak
DTKS	: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
FPKK	: Forum Penanganan Korban Kekerasan
GBV	: <i>Gender-Based Violence</i>
KBG	: Kekerasan berbasis Gender
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KEK	: Kekurangan Energi Kronis
KTD	: Kehamilan Tidak Diinginkan
KPM	: Kader Pemberdayaan Masyarakat
KWT	: Kelompok Wanita Tani
NTB	: Nusa Tenggara Barat
NTT	: Nusa Tenggara Timur
PAMSIMAS	: Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
PEMDES	: Pemerintah Desa
PERDES	: Peraturan Desa
PERPRES	: Peraturan Presiden
PHBS	: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
PKK	: Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
PMT	: Pemberian Makanan Tambahan
SATGAS	: Satuan Tugas
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SK	: Surat Keputusan
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SSP	: Sanggar Suara Perempuan
TKD	: Tenaga Kesehatan Desa
TFR	: <i>Total Fertility Rate</i>
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TPPO	: Tindak Pidana Perdagangan Orang
TTU	: Timor Tengah Utara
TTS	: Timor Tengah Selatan

ABSTRAK

Kegiatan penyusunan Buku Praktek Baik SDGs Desa ini dilakukan pada sepuluh Desa di Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara selama periode Mei – Juli 2022. Sepuluh desa tersebut antara lain Banjarrarum, Kuanek, Pringgasela Selatan, Babakan Gebang, Ajaobaki, Banjarharjo, Batutulis, Oesena, Sidorejo dan Pugung Raharjo. Dukungan penulisan buku dilakukan atas kerjasama INFID dan Ford Foundation di Indonesia. Isi dokumen ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab INFID dan penulis, dan tidak mencerminkan pendapat dari Ford Foundation di Indonesia.

Penulisan buku menggunakan pendekatan kualitatif (*place-based community research*) dengan pengumpulan data melalui Diskusi Kelompok Terarah (FGD) dan wawancara mendalam. Jumlah informan yaitu 107 orang, 54 diantaranya laki-laki, dan 53 perempuan. Sumber data lainnya yang digunakan yaitu data profil sepuluh desa. Adapun pengolahan data kualitatif dilakukan dengan menggunakan aplikasi Nvivo.

Untuk memastikan kualitas, kegiatan *peer review* instrumen dilakukan di awal sebelum penggalan data informasi. Setelah pengolahan data selesai, kemudian dilakukan diskusi terbatas (*expert meeting*) dengan melibatkan Sekretariat SDGs Nasional di Bappenas dan Badan Pengembangan Informasi Desa Kemendesa PDTT pada 28 Juni 2022 di Jakarta.

Selama ini, pendekatan “hasil” dengan skor capaian kuantitatif menjadi sentral dalam melihat SDGs. Padahal, SDGs Desa membicarakan 83.000 desa di Indonesia yang memiliki ragam karakter dengan permasalahan yang berbeda-beda. Pendekatan “hasil” baik digunakan untuk melihat agregat dan melakukan komparasi. Namun demikian, pendekatan “proses” juga penting untuk digunakan. Mengingat pendekatan proses mampu melihat secara lebih dalam dan detail berbagai upaya serta dinamika dalam mencapai tujuan SDGs tersebut. Jika semangat SDGs desa adalah kontekstualisasi, maka pendekatan kualitatif menjadi relevan dalam melengkapi berbagai indikator kuantitatif yang sudah ada.

Laporan ini berupaya untuk menutup ketimpangan (gap) tersebut, dengan berusaha menampilkan proses dinamis dari desa dalam mencoba menerapkan/ mencapai tujuan- tujuan SDGs Desa. Tidak semua hal tentu dapat digambarkan secara akurat dengan “angka- angka” dan “persentase” seperti yang biasa digunakan dalam pendekatan hasil (*output*). Banyak hal yang bersifat subjektif – yang merupakan hasil konstruksi subyek – terhadap proses-proses pembangunan yang terkadang luput untuk didengar dan didokumentasikan.

Oleh karena itu, narasi yang ditampilkan dalam buku ini menunjukkan bagaimana dinamika proses pencapaian SDGs di level desa tidaklah semulus atau semudah yang direncanakan. Tantangan riil di lapangan inilah yang penting dipotret untuk melengkapi gambaran makro- kuantitatif dari berbagai indikator SDGs Desa yang sudah disusun oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

KATA PENGANTAR

“*No one left behind*” atau tidak ada satu pun yang tertinggal adalah prinsip yang disepakati oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, untuk menjalankan kesepakatan agenda pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan ditargetkan akan tercapai pada tahun 2030. Prinsip ini terlihat sederhana namun tidak mudah diimplementasikan karena mengandung arti bahwa semua proses pembangunan yang ada, dari mulai tingkat daerah sampai nasional, tidak meninggalkan satu warga pun, baik dalam perencanaan pembangunan sampai dengan penikmatan hasil-hasil pembangunan, terlepas dari perbedaan suku, agama, ras, etnik, budaya, jenis kelamin, gender, pekerjaan dan lainnya.

Desa/Kelurahan sebagai lembaga pemerintahan terbawah juga mempunyai peran yang sangat besar dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui SDGs Desa. Desa mempunyai banyak praktik baik dalam mengimplementasikan SDGs Desa yang berperspektif gender dan inklusi khususnya pada goal 1,5 dan 8 dengan menggunakan berbagai kearifan lokal yang dimilikinya. Banyak desa-desa yang telah berhasil menjadikan desanya menjadi desa yang ramah perempuan dan peduli anak, menjadi desa yang mempunyai keberpihakan pada korban kekerasan terhadap perempuan, menjadi desa yang peduli terhadap kebutuhan kelompok rentan seperti disabilitas, desa yang peduli perempuan pekerja migran atau desa yang mempunyai perhatian terhadap upaya pemberdayaan ekonomi perempuan.

Kalyanamitra bersama dengan Konsorsium ADARA NTB dan Konsorsium Timor Adil dan Setara (KTAS) NTT selama ini juga telah bekerja bersama dengan desa untuk mendorong pencapaian pembangunan desa yang berperspektif gender dan inklusi di wilayah NTT, NTB, Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Barat dan Lampung. Kolaborasi kerja ini sebelumnya mendapat dukungan dari program IWILL Oxfam Indonesia, Program Pemberdayaan Desa Bread for the World dan Program Safe and Fair UN Women.

Ada 10 desa yang mempunyai praktik baik dalam implementasi SDGs Desa yang diangkat dalam buku ini, yaitu Desa Ajaubaki Timur Tengah Selatan, Desa Kuanek Timur Tengah Utara, Desa Oesena Kab Kupang, Desa Pringgasele Selatan Lombok Timur, Desa Batu Tulis Lombok Tengah, Desa Babakan Gebang Kab Cirebon, Desa Banjarharjo Yogyakarta, Desa Banjararum Yogyakarta, Desa Sidorejo Lampung Timur dan Desa Pugung Raharjo Lampung Timur.

Pengalaman dan praktik baik desa dalam menjalankan pembangunan yang berperspektif gender dan inklusi ini diharapkan akan menjadi pembelajaran dan pengetahuan bersama, khususnya bagi pemerintah desa di seluruh Indonesia dalam membangun desanya. Desa dengan kekuatan dan modalitas dirinya mempunyai peran yang strategis dan krusial dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Apa yang sudah dilakukan oleh 10 desa ini juga dapat menjadi *role model* yang dapat direplikasi dan disempurnakan oleh desa-desa lainnya. Dari desa banyak hal yang dapat kita pelajari dan menjadi pengetahuan bersama.

Listyowati
Ketua Kalyanamitra

PRAKTEK BAIK SDGs DESA: KUMPULAN KISAH SUKSES DAN PEMBELAJARAN DALAM IMPLEMENTASI SDGs

Buku praktek baik Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Desa ini diluncurkan ketika kita tinggal memiliki waktu 8 tahun lagi untuk mencapai tujuan SDGs di tahun 2030. Sementara itu, tujuan SDGs hanya dapat berhasil bila dan jika pelaksanaannya dilakukan oleh multipihak dan khususnya di tingkat pemerintahan terendah yaitu Desa/Kelurahan, karena disanalah pelayanan publik langsung bersentuhan dan diterima oleh warga.

Saat ini beberapa capaian positif terkait dengan SDGs mulai nampak. Semangat pemerintah mengenai SDGs sudah berbeda dibandingkan saat MDGs. Pemerintah tidak lagi terlambat dalam mengadopsi SDGs. Payung hukum sudah terbentuk, begitu pula rencana aksi tahunan dan Tim Koordinasi Nasional. Indonesia secara rutin juga memberikan laporan ke komunitas internasional yaitu *Voluntary National Review* (VNR) di tahun 2017, 2019, 2021 dan direncanakan keempat kalinya di tahun 2024. Bahkan di tingkat Desa, Kementerian Desa telah melakukan pelokalan SDGs melalui SDGs Desa dengan dikeluarkannya Permendes PDPTT No.13/2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021 untuk pelaksanaan SDGs Desa.

Inisiatif SDGs Desa merupakan hal yang perlu diapresiasi dalam pelaksanaan SDGs di Indonesia. *Pertama*, SDGs Desa memiliki sumber dana yang sudah mapan yaitu Dana Desa, sehingga pelaksanaan SDGs Desa dapat lebih direncanakan dan diimplementasikan dengan baik. *Kedua*, Desa merupakan unit pemerintahan paling bawah, dimana pelayanan publik langsung bersentuhan dengan warga. Sehingga pelayanan publik yang maksimal di Desa, tentunya akan berkontribusi secara positif kepada pelayanan publik secara nasional. *Ketiga*, dengan adanya SDGs yang memiliki target dan indikator dengan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Attainable, Relevant, dan Time-bound*), maka inisiatif di Desa yang sudah berjalan dan berdampak dapat lebih terpetakan dengan baik, khususnya dalam perencanaan ke depan.

Dalam upaya mendorong percepatan pencapaian SDGs, khususnya SDGs Desa, INFID dan Kalyanamitra kemudian menyusun Buku Praktek Baik SDGs Desa ini. INFID dan Kalyanamitra berharap, Buku Praktek Baik SDGs Desa ini dapat mengisi kekosongan terkait kemajuan pelaksanaan SDGs Desa di Indonesia, menjadi pijakan dan inspirasi dalam pelaksanaan SDGs bagi 83.000 Desa lainnya di Indonesia.

Bona Tua Parlingomon Parhusip
Senior Program Officer SDGs INFID





PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

“The 17 SDGs and 169 targets which we are announcing today demonstrate the scale and ambition of this new universal Agenda. They seek to build on the MDGs and complete what they did not achieve. They seek to realize the human rights of all and to achieve gender equality and the empowerment of all women and girls. They are integrated and indivisible and balance the three dimensions of sustainable development: the economic, social, and environmental”.^[1]

Dari MDGs ke SDGs

Jauh sebelum mengenal *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)[1], dunia lebih dahulu mengenal *Millenium Development Goals* atau biasa disingkat MDGs. Tujuan Pembangunan Milenium ini disepakati oleh PBB pada tahun 2000¹ dan telah dilaksanakan oleh berbagai Negara di dunia sampai dengan tahun 2015. Tiga hal yang saat itu menjadi pilar dalam pelaksanaan MDGs adalah 3P: *Planet* (lingkungan), *Profit* (ekonomi), dan *People* (sosial). MDGs memiliki 8 tujuan dan 60 target yang disepakati oleh Dunia pada saat itu. MDGs dianggap berhasil secara signifikan dalam mendorong beberapa hal, seperti (dalam kasus Indonesia) berhasil menurunkan kemiskinan hingga lima puluh persen (dengan indikator 1 USD/hari), tercapainya sasaran pendidikan dasar (SD/MI) lebih dari seratus persen, peningkatan proporsi kursi parlemen yang diduduki oleh perempuan juga mencapai 17,9 persen, penurunan angka kematian bayi, penetrasi internet dan telepon seluler yang sangat pesat dan lain sebagainya[2].

Namun demikian, setelah berjalan kurang lebih lima belas tahun, banyak hal yang masih *jauh panggang dari api*. Kurangnya koordinasi, komitmen dan komunikasi antar pemangku kepentingan dianggap sebagai penyebab pencapain MDGs masih bersifat parsial. Riset menyebutkan bahwa minimnya keterlibatan negara-negara berkembang dalam desain MDGs juga mempengaruhi komitmen mereka[3]. Tak hanya di Indonesia, permasalahan serupa juga terjadi di banyak negara lainnya. Oleh karena itu, pada tahun 2015, tepatnya pada sidang umum PBB 25 September 2015, Dunia

kembali merancang dan memperbaiki berbagai kekurangan MDGs dengan mendeklarasikan SDGs. Kali ini SDGs tidak hanya terdiri dari tiga pilar, melainkan berkembang menjadi lima (5) dimensi: *People, Planet, Prosperity, Peace, and Partnership*. Sebagai sebuah rencana global, SDGs berisi rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan².

SDGs pun kemudian disepakati dan diadopsi oleh 193 Negara. Ia berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030, antara lain seperti: (1) Dunia Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan³.

Meski terlihat berdiri sendiri-sendiri, ketujuh belas tujuan SDGs di atas sejatinya beririsan satu sama lainnya. Kemajuan pada pencapaian satu tujuan SDGs, akan terkait dan berpengaruh pada pencapaian tujuan SDGs lainnya. Merespon kesepakatan SDGs tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas pun menyusun beberapa instrument pendukung pelaksanaan SDGs di Indonesia, seperti peta jalan (road map)

1 MDGs diadopsi oleh 189 negara dan ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat KTT New York, 25 September 2000

2 <https://www.sdg2030indonesia.org/>

3 <https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>

SDGs⁴, Pedoman teknis penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN)⁵, hingga Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs. Secara ide dan harapan, SDGs tentu lebih baik dibanding dengan MDGs. Salah satunya ditunjukkan dengan prinsip SDGs yang sangat terkenal, yaitu *“No one left behind”*, yang berarti tidak boleh satu pun yang tertinggal. Dengan kata lain, prinsip ini memiliki makna yang universal (berpusat pada hak universal manusia) sekaligus terintegrasi (sosial, ekonomi, dan lingkungan). Indonesia pun menyambut SDGs ini dengan menetapkan empat pilar pembangunan SDGs, yaitu sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata Kelola⁶. Hal lain yang menjadi perbaikan SDGs terhadap MDGs adalah fokusnya yang berorientasi pada dampak, dengan penekanan pada kerjasama dan partisipasi publik secara holistik, transparan, dan akuntabel.

Mengenal SDGs Desa

Sebagai sebuah proyek pembangunan global yang sangat ideal, SDGs juga dinilai cukup ambisius. Tidak mudah mencapai indikator SDGs, bahkan oleh negara maju sekalipun. Terkait dengan ketimpangan negara maju dan berkembang, misalnya, sangat sulit mengukur kemajuan negara berkembang dengan menggunakan standar yang berlaku di negara-negara industri maju⁷. Dari sini muncul ragam gagasan untuk melakukan kontekstualisasi tujuan-tujuan dan indikator-indikator SDGs agar lebih *“membumi”*. Sebagai contoh, secara geografis wilayah Indonesia didominasi oleh wilayah pedesaan dengan 43% penduduknya tinggal di desa. Dengan kondisi objektif seperti

ini, maka penting untuk mengadopsi SDGs dengan berbagai indikator yang mencerminkan karakteristik khas pedesaan Indonesia. Dengan kata lain, SDGs yang kita adopsi haruslah yang mampu mempertahankan ragam kekayaan sumber daya alam maupun sosial-budaya di pedesaan, bukan justru sebaliknya.

Dengan kesadaran seperti itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, A. Halim Iskandar, sekaligus pencetus SDGs Desa⁴, berupaya untuk meramu SDGs yang lebih membumi dan sesuai dengan arah besar pembangunan desa di Indonesia. Muncullah apa yang kemudian kita kenal sebagai *“SDGs Desa”*. Tidak hanya dengan menurunkan 17 tujuan SDGs global, tetapi dalam SDGs Desa ditambahkan satu tujuan tambahan yaitu *“kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif”* sebagai tujuan ke-18. Dasar pemikirannya adalah untuk menghargai keberadaan bangsa Indonesia yang sangat beragam dalam agama, budaya, bahasa, adat istiadat, dan lain-lain, serta sekaligus menampung kearifan lokal masyarakat dan kelembagaan desa yang produktif agar mampu untuk bertahan, bahkan terus berkembang (Iskandar, 2020)⁸.

Secara istilah dan penyebutan, maka sebutan atas seluruh tujuan pembangunan desa ini disebut sebagai SDGs Desa. Diksi SDGs tetap digunakan karena ringkas, bisa lebih cepat familiar, bahkan untuk warga desa sendiri⁹. SDGs Desa ini pun memiliki 18 tujuan, antara lain: (1) Desa tanpa kemiskinan (2) Desa tanpa kelaparan (3) Desa sehat dan sejahtera (4) Pendidikan desa berkualitas (5) Keterlibatan perempuan desa (6) Desa layak air bersih dan sanitasi (7) Desa berenergi bersih dan

4 https://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Roadmap_Bahasa-Indonesia_File-Upload.pdf

5 <https://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Buku-Pedoman-Rencana-Aksi-SDGs.pdf>

6 <https://sdgs.bappenas.go.id/dokumen/>

7 <https://sdgsdesa.kemendesa.go.id/sdgs-desad-dan-rekonstruksi-para-digma-pembangunan-berkelanjutan/>

8 Iskandar, A. Halim. 2020. SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan

9 <https://sdgsdesa.kemendesa.go.id/dari-tpb-ke-sdgs-desa/>

terbarukan (8) Pertumbuhan ekonomi desa merata (9) Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan (10) Desa tanpa kesenjangan (11) Kawasan pemukiman desa aman dan nyaman (12) Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan (13) Desa tanggap perubahan iklim (14) Desa peduli lingkungan laut (15) Desa peduli lingkungan darat (16) Desa damai berkeadilan (17) Kemitraan untuk pembangunan desa (18) Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif¹⁰

Implementasi SDGs Desa

Merujuk pada Perpres 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, pemerintah pun menetapkan SDGs Desa sebagai langkah strategi untuk mencapai 74% Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia¹¹. Pemerintah melalui Kemendes PDTT pun mendorong agar seluruh belanja Dana Desa wajib digunakan untuk menjalankan SDGs Desa. Pada tahun 2020, Sistem Informasi Desa mulai dijalankan. Isinya berupa asupan data detail tahunan tentang kondisi pada level desa, level rukun tetangga dan keluarga. Validasi dan verifikasi langsung dijalankan di tiap desa dan kecamatan, agar keraguan tentang akurasi data dapat langsung dicek di lapangan¹². Implementasi kebijakan ini ke seluruh desa di Indonesia pun dipastikan melalui Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 dan Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

Untuk mendukung implementasi SDGs Desa,

¹⁰ <https://sdgsdesa.kemendes.go.id/sdgs-des/>

¹¹ <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2020/12/sosialisasi-permendesa-13-2020.pdf>

¹² <https://sdgsdesa.kemendes.go.id/sdgs-des-2/>

Kemendes PDTT pun memulai proses **Pendataan SDGs Desa sejak tahun 2021. Untuk pendataan ini, setiap Kepala Desa** menerbitkan Surat Keputusan untuk membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pendataan Desa. Sekretaris Desa menyiapkan data awal yang mencakup nama dan alamat dari keluarga dan warga desa (*by name by address* atau BNBA) dari berbagai sumber, seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, Poskesdes, Posyandu, PAUD, SD, SMP dan sederajat, SMA dan sederajat yang terdapat di desa setempat atau sekitarnya, Pokja Relawan Pendataan Desa pun mendapatkan pelatihan secara daring (*online*) pada laman Akademi Desa 4.0. Pelatihan mandiri dapat dilakukan secara luring (*offline*) bersama pendamping desa.

Pendataan dilakukan mulai dari unsur perangkat desa hingga Rukun Tetangga (RT). Pendata di tiap RT harus mewawancarai keluarga untuk mengisi aplikasi kuesioner. Dalam kondisi tidak ada sinyal internet, aplikasi Pendataan SDGs Desa tetap bisa dijalankan, dan begitu ada sinyal internet maka otomatis terhubung server Sistem Informasi Desa. Jadi, jika digunakan secara *offline*, maka untuk upload data perlu dijalankan di lokasi yang terdapat sinyal internet. Seminggu sekali, seluruh relawan Pokja Pendataan Desa pun bertemu untuk melakukan *crosscheck*, verifikasi, validasi dan koreksi kesalahan pengisian data. Jika sudah lengkap, Kepala desa akan melakukan pertemuan untuk menetapkan data hasil SDGs Desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Data SDGs Desa.

Setelah pendataan dan penetapan, tahapan selanjutnya adalah pengolahan dan analisis data yang dilakukan secara elektronik oleh Sistem Informasi Desa yang dikembangkan

oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Hasil pengolahan dan data SDGs Desa dapat dilihat oleh pemerintah desa secara detil, dan rekapnya dapat dilihat oleh pemerintah daerah pada level kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi, serta masyarakat pada umumnya. Pengolahan dan analisis dalam Sistem Informasi Desa tersebut kemudian menghasilkan rekomendasi perbaikan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan-tujuan dalam SDGs Desa.

Dalam setiap proses di atas, peran pendamping desa sangatlah krusial. Mereka berperan dalam menjelaskan proses pemutakhiran data SDGs Desa, melakukan monitoring terhadap seluruh proses pemutakhiran data SDGs Desa, memecahkan masalah lapangan, dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemutakhiran data SDGs Desa kepada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Monitoring dan dukungan dalam implementasi SDGs Desa juga diperoleh dari pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat (Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi). Pemerintah Pusat menyediakan Sistem Informasi Desa yang di dalamnya mencakup aplikasi pendataan SDGs Desa, penyimpanan data, pengolahan dan analisis data, penyusunan rekomendasi pembangunan desa dan pemberdayaan

masyarakat sesuai SDGs Desa. Kementerian juga menyediakan bahan dan alat pelatihan pendataan SDGs Desa bagi pendamping dan Pokja Relawan Pendataan Desa serta mengelola data SDGs Desa pada level nasional.

Meskipun sudah cukup sistematis hingga di level teknis, sebagai “barang baru” SDGs Desa tentu masih menghadapi banyak tantangan. Tantangan substantif terletak pada bagaimana pemerintah desa mampu memahami persoalan dan merumuskan kebijakan/intervensi yang tepat berdasarkan hasil pemetaan mereka. Tantangan teknis tentu saja terkait pengumpulan dan pemutakhiran data, informasi, koordinasi, kolaborasi, partisipasi, dan disiplin pelaksanaan SDGs Desa. Kemampuan pemerintah dari pusat sampai dengan daerah tentu saja terbatas, sehingga perlu keterlibatan organisasi non pemerintah (akademia, sektor privat, NGO/CSOs, dan lain-lain) untuk mendorong keberhasilan implementasi SDGs Desa ini. Di sisi lain, indikator pencapaian SDGs Desa juga perlu ditentukan dan dikembangkan bersama-sama secara partisipatif. Termasuk, memastikan sumber daya keuangan dan non-keuangan dapat digerakkan bersama-sama, bukan hanya dari pemerintah tetapi juga dana dari CSR dan sumber pembiayaan lainnya.

METODOLOGI

Women are poorer than men – in other words, men are richer than women, Women suffer more from lack of time than men – in other words, men have more leisure time than women, Women have only a limited range of options – men have a wider range, Women give priority to others – men invest more resources in themselves. [5]

SDGs Desa dan Kesetaraan Gender

Salah satu topik penting yang ingin digali dari proses pencapaian SDGs Desa adalah bagaimana kesetaraan gender dapat dicapai di seluruh desa-desa di Indonesia? Hal ini tentu tidak mudah. Meskipun kesetaraan gender telah ditetapkan menjadi salah satu tujuan SDGs Desa, namun pencapaiannya sangatlah kontekstual, tergantung karakteristik dan tantangan sosiokultural masing-masing desa. Secara global, kita telah mengenal berbagai metode pengukuran ketimpangan gender yang dibuat oleh berbagai lembaga dunia, seperti UNDP, WEF, dan OECD.

Laporan *Gender Index 2022 Back to Normal is Not Enough* [6], misalnya, telah mengukur komitmen dan perkembangan global dengan

lensa gender sejak SDGs dimandatkan pada 2015 sampai awal 2020. Laporan ini sendiri melibatkan 98 persen penduduk perempuan sebagai responden data di 144 negara. Laporan tersebut menemukan skor indeks Indonesia mencapai 66,7 atau terdapat peningkatan 1,8 poin sejak 2015. Meski demikian, skor tersebut masih di bawah rata-rata untuk daerah Asia dan Pasifik dengan skor 67,7. Karenanya, untuk wilayah tersebut Indonesia menduduki peringkat 15 di antara 26 negara. Sementara itu, laporan EM2030 pada 2019 menunjukkan Indonesia berada di posisi 11 di antara 23 negara wilayah Asia dan Pasifik¹³.

Selain masalah politik dan ekonomi, WEF menilai kesenjangan gender di negara-negara dunia dari beragam indikator terkait pendidikan dan kesehatan. WEF kemudian menerapkan sistem skor dengan skala 0-1. Skor '0' dimaknai sebagai kondisi di mana hak laki-laki dan perempuan sangat timpang. Sedangkan skor '1' dianggap sebagai kondisi dengan kesetaraan sempurna. Uni Eropa sebagai organisasi supranasional anggota G20 tidak dihitung, karena negara-negara anggotanya sudah dinilai WEF secara terpisah. Adapun negara anggota Uni Eropa seperti Finlandia, Norwegia, Swedia, Irlandia, Austria, dan lain-lain umumnya dinilai memiliki kesetaraan gender di atas rata-rata dunia, dengan skor di atas 0,700. Sedangkan Indonesia mendapat skor 0,688, menjadikannya berada di peringkat ke-13 negara G20 (minus Uni Eropa), serta peringkat ke-101 dari 156 negara yang disurvei WEF¹⁴.

¹³ <https://magdalene.co/story/SDGs-Gender-Index-2022>

¹⁴ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/04/indeks-kesenjangan-gender-negara-g20-di-mana-posisi-indonesia>

Tabel 1. Ragam indeks untuk mengukur kesetaraan Gender

No	Indeks	Penyusun	Keterangan
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)[7]	Kementerian PPPA RI	Perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan IPM perempuan dilihat dari kualitas dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi . Angka IPG yang mendekati 100 menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan perempuan hampir sama dengan laki-laki
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)[7].	Kementerian PPPA RI	IDG mengukur partisipasi aktif perempuan di bidang ekonomi, politik dan manajerial . Tiga indikator yang digunakan yaitu persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan.
3	Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender (IKKG) [8]	PPN/Bappenas	IKKG mengukur pencapaian kesetaraan dan keadilan dalam variabel-variabel <i>output</i> atau <i>outcome</i> (bukan input), sehingga dalam penggunaannya perlu dilengkapi dengan Indikator Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (IKPUG) yang mengukur variabel input. IKKG dibangun sebagai perluasan dari Indeks Ketidaksetaraan Gender/ <i>Gender Inequality Index</i> (UNDP 2010).
4	<i>Gender Inequality Index (GII)</i> atau Indeks Ketimpangan Gender (IKG)[9]	UNDP	GII/IKG mengukur ketimpangan gender melalui tiga dimensi: kesehatan reproduktif, pemberdayaan, dan pasar kerja . Skor GII yang rendah mengindikasikan rendahnya ketimpangan gender, sebaliknya, skor yang tinggi menunjukkan tingginya ketimpangan gender.
5	<i>Global Gender Gap Index (GGGI)</i> [10]	WEF	GGGI mengukur ketimpangan gender dari empat kategori utama (subindexes) dan 14 indikator komposit lainnya. Keempat dimensi tersebut adalah kesempatan dan partisipasi ekonomi, capaian pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan politik . Skor GGGI tertinggi adalah 1 (equality) dan skor terendah adalah 0 (inequality).
6	<i>Social Institutions and Gender Index (SIGI)</i> [11] the Social Institutions and Gender Index (SIGI)	OECD	SIGI mengukur diskriminasi terhadap perempuan dalam lembaga/institusi sosial di 180 negara. Indikator yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, serta norma dan pratek sosial . SIGI berusaha melihat faktor pendorong (underlying drivers) ketimpangan gender dan berusaha mendorong perubahan kebijakan publik yang transformatif.

Dalam mencapai tujuan Desa Ramah Perempuan (SDGs 5) dalam SDGs Desa, misalnya, digunakan beberapa indikator kuantitatif sebagai berikut:

- 1 Perdes/SK Kades yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan minimal 30%
- 2 Terdapat perdes/SK Kades yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait KB dan kesehatan reproduksi.
- 3 Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan mencapai 0%
- 4 Kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif mencapai 100%
- 5 Median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) di atas 18 tahun
- 6 Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun mencapai 0%
- 7 APK SMA/SMK/MA/ sederajat mencapai 100%
- 8 Persentase jumlah perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa minimal 30%
- 9 Persentase jumlah perempuan yang menghadiri musdes dan berpartisipasi dalam pembangunan desa minimal 30%
- 10 *Unmet need* kebutuhan ber-KB mencapai 0%, dan Pasangan Usia Subur (PUS) memahami metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis

Berbagai pengukuran di atas tentu saja dapat menjadi referensi secara makro dan agregat. Namun dalam evaluasi pencapaian kesetaraan gender di desa-desa, tentu tidak cukup. Diperlukan *insight* yang lebih dalam untuk memotret kualitas kesetaraan gender tersebut. Karena sekali lagi, setiap desa berangkat dari

titik yang berbeda, kemampuan dan sumber daya yang berbeda, serta berbagai tantangan dan keterbatasan yang beragam pula untuk mencapai kesetaraan gender yang diharapkan.

Evaluasi SDGs Desa

Seperti halnya SDGs yang disepakati secara global, SDGs Desa juga memiliki dimensi yang diturunkan dari SDGs global tersebut. Jika SDGs global dibangun berdasar lima (5) dimensi (*people, planet, prosperity, peace, and partnership*), maka SDGs Desa dibangun di atas enam (6) dimensi, yaitu: (1) warga desa sejahtera, (2) keseimbangan alam, (3) kemakmuran desa, (4) perdamaian, (5) kemitraan, dan (6) kelembagaan dan kearifan desa. Dimensi keenam ini hadir atau ditambahkan untuk memastikan bahwa desa tetap memiliki kelembagaan yang kokoh serta diakui, dihormati, dan dilindungi hak-haknya sebagai sebuah kesatuan kolektif yang memiliki kearifan lokal, adat-istiadat, dan kekhasan masing-masing. Semangat ini tentu sangat selaras dengan fakta keragaman sosial budaya puluhan ribu desa-desa di Indonesia. Selain enam dimensi di atas, SDGs Desa memiliki 18 Tujuan sebagai berikut:

- 1 Desa tanpa kemiskinan
- 2 Desa tanpa kelaparan
- 3 Desa peduli kesehatan
- 4 Pendidikan desa berkualitas
- 5 Keterlibatan perempuan desa
- 6 Desa layak air bersih dan sanitasi
- 7 Desa berenergi bersih dan terbarukan
- 8 Pertumbuhan ekonomi desa merata
- 9 Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan
- 10 Desa tanpa kesenjangan
- 11 Kawasan permukiman desa aman dan nyaman

- 12 Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan
- 13 Desa tanggap perubahan iklim
- 14 Desa peduli lingkungan laut
- 15 Desa peduli lingkungan darat
- 16 Desa damai berkeadilan
- 17 Kemitraan untuk pembangunan desa
- 18 Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif

Dari 18 tujuan SDGs Desa, Kemendes PDTT merumuskan delapan (8) tipe desa dengan masing-masing indikator keberhasilan untuk setiap tujuan SDGs. Ke delapan tipe Desa tersebut adalah (1) Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan (2) Desa peduli kesehatan (3) Desa peduli pendidikan (4) Desa ramah perempuan (5) Desa ekonomi tumbuh merata (6) Desa peduli lingkungan (7) Desa berjejaring (8) Desa tanggap budaya. Masing-masing tipe desa, memiliki sejumlah indikator kuantitatif untuk mengukur keberhasilan pencapaian target masing-masing (lihat lampiran). Indikator kuantitatif ini sangat lazim digunakan dalam pengukuran target SDGs, bahkan menjadi *mainstream*¹⁵.

Evaluasi terhadap capaian SDGs tentu dengan melihat berbagai skor capaian kuantitatif yang telah ditetapkan pada masing-masing tujuan. Pendekatan “hasil” menjadi sentral dalam melihat SDGs. Padahal, kita sedang membicarakan puluhan ribu desa di Indonesia yang memiliki ragam karakteristik, dan tentu saja, permasalahan yang berbeda-beda. Pendekatan hasil baik digunakan untuk melihat agregat dan melakukan komparasi, akan tetapi pendekatan “proses” juga penting untuk digunakan. Mengingat pendekatan proses mampu melihat secara lebih dalam dan detail dalam mencapai tujuan SDGs tersebut. Jika semangat SDGs desa adalah kontekstualisasi, maka pendekatan kualitatif menjadi relevan.

Sejauh ini belum ada rumusan atau pendekatan kualitatif yang digunakan untuk melihat sejauh mana implementasi dan keberhasilan SDGs Desa? Laporan ini berupaya untuk menutup ketimpangan (*gap*) tersebut, dengan berusaha menampilkan proses dinamis dari desa dalam mencoba menerapkan/mencapai tujuan-tujuan SDGs Desa. Tidak semua hal tentu dapat digambarkan secara akurat dengan “angka-

Tabel 2. Tipe desa berdasarkan SDGs Desa¹⁶

8 Tipe Desa	SDGs
1. Desa Tanpa Kemiskinan & Kelaparan	1, 2
2. Desa Peduli Kesehatan	3, 6, 11
3. Desa Peduli Pendidikan	4
4. Desa Ramah Perempuan	5
5. Desa Ekonomi Tumbuh Merata	8, 9, 10, 12
6. Desa Peduli Lingkungan	7, 13, 14, 15
7. Desa Berjejaring	17
8. Desa Tanggap Budaya	16, 18

¹⁵ <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/>

¹⁶ Sosialisasi Permendes PDTT No 13/20 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021

angka” dan “persentase” yang biasa digunakan dalam pendekatan hasil (*output*). Banyak hal yang bersifat subjektif – yang merupakan hasil pengalaman dan konstruksi subyek – terhadap proses-proses pembangunan yang justru tidak terwakili oleh angka-angka tersebut, padahal suara mereka sangat penting untuk di dengar sebagai bagian dari proses pencapaian tujuan SDGs Desa.

dalam tujuan SDGs, memang telah dikhususkan tujuan untuk kesetaraan gender (tujuan 5, keterlibatan perempuan desa). Namun hal ini bukan berarti tanpa kritik. Idealnya, kesetaraan gender ini tidak hanya menjadi salah satu tujuan dan indikator, tetapi harus diintegrasikan atau melekat pada seluruh tujuan dan indikator SDGs desa. Sehingga kesetaraan gender tidak hanya bersifat parsial, namun bisa lebih terintegasi



Gambar 1. Suasana FGD Penggalan Data di Desa Kuanek

Sebagai contoh, “partisipasi” atau “peran” perempuan dalam pengambilan keputusan penting di tingkat desa, tidak selalu dapat direpresentasikan dengan “jumlah perempuan” yang hadir dalam rapat semata, atau “jumlah perempuan yang duduk dalam kepengurusan”, namun perlu pendalaman terkait seberapa besar pengaruh mereka? Lalu, apakah kepentingan perempuan serta merta terwakili dan mendapat prioritas dalam keputusan kolektif? Dan lain sebagainya. Contoh lainnya,

dan menyeluruh pada setiap aspek, dimensi, praktek dan tujuan pembangunan desa.

Oleh karena itu, narasi yang ditampilkan dalam buku ini akan menunjukkan bagaimana dinamika proses pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di level desa tidaklah semulus atau semudah yang direncanakan. Tantangan riil di lapangan itulah yang penting dipotret untuk melengkapi gambaran makro-kuantitatif dari berbagai indikator SDGs yang sudah disusun oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Desa dan PDTT.



Gambar 2. Suasana FGD pengumpulan data di Desa Ajaobaki

Sebuah studi literatur terkait dengan implementasi SDGs telah dilakukan oleh Mbah & East (2022), khususnya berbagai studi yang menggunakan pendekatan kualitatif pada tahun 2021[12]. Mereka menggunakan beberapa kata kunci untuk menemukan berbagai studi yang mengevaluasi implementasi SDGs di dunia, termasuk di dalamnya adalah “*qualitative research*”, “*sustainable development goals*” and “*focus groups*” or “*qualitative interviews*” or “*ethnography*” or “*photovoice*”. Terkumpullah 54 artikel hasil penelitian yang memenuhi berbagai kriteria yang mereka cari. Motivasi dari riset tersebut adalah untuk mendapatkan *insight* dan memetakan kontribusi riset-riset kualitatif dalam studi SDGs. Seperti kita tahu, pendekatan kualitatif sangat berbeda dan unik, karena mengutamakan konteks dan partisipasi para subyek pelaku itu sendiri (*data collected from local, place-based community participants*). Pendekatan ini tentu dapat menjembatani dan memberikan pengayaan lebih terhadap berbagai kebijakan di tingkat global, dalam hal

ini SDGs, dengan prakteknya di tingkat akar rumput. Catatan menarik dari studi literatur tersebut yang dapat kita gunakan sebagai basis kajian evaluasi SDGs Desa di Indonesia secara kualitatif, antara lain:

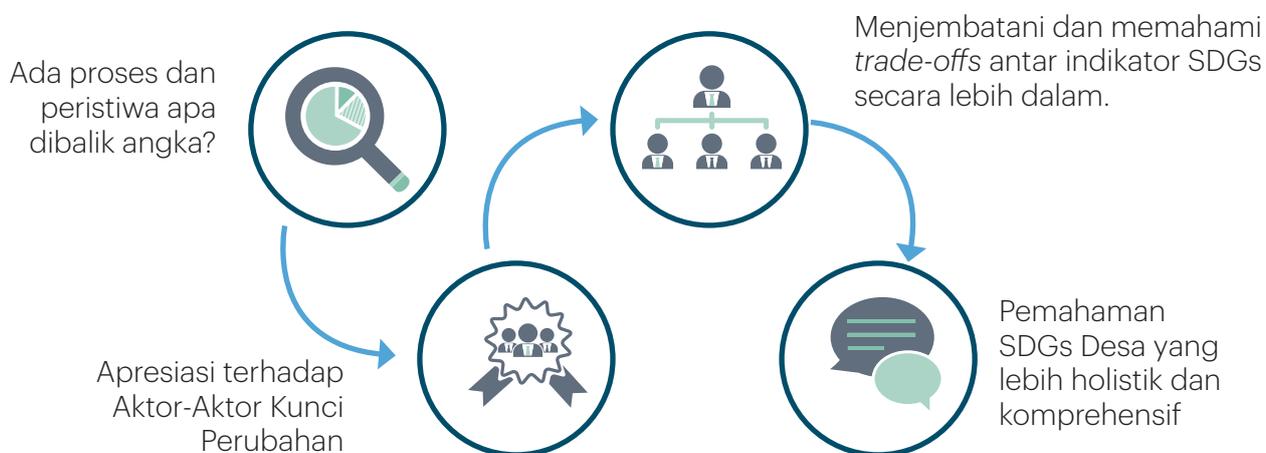
Pertama, perlu diingat dan diperhatikan bahwa kemajuan dalam mencapai satu tujuan SDGs dapat melahirkan dampak negatif pada tujuan SDGs lainnya (*progress towards one goal can have a negative impact on progress towards others*). Contoh “*trade-offs*” seperti ini banyak ditemukan dalam hasil penelitian SDGs. Misalnya, riset di beberapa pedesaan di Afrika (Kenya, Malawi, Zambia, and Zimbabwe) menemukan bahwa inovasi dalam mengganti tempat penyimpanan gandum tradisional (*traditional grain stores*) dengan silo-silo modern terbukti lebih efisien dan mengurangi *food waste* di tempat-tempat tersebut[13]. Namun demikian, ketika SDGs 2 and 9 tercapai, ternyata ada dampak negatif terhadap kondisi finansial perempuan. Sebab, akses atau kepemilikan silo-silo modern tersebut kemudian beralih ke tangan laki-laki. Padahal, silo tradisional sebelumnya

lebih banyak dikelola dan dikuasai perempuan. Dengan kata lain, peningkatan capaian SDGs 2 and 9, harus dibayar dengan pengurangan capaian pada SDG 5 – keterlibatan perempuan.

Contoh lain adalah kasus ekoturisme di Taman Nasional Komodo, Indonesia[14] yang diniatkan untuk mencapai SDG 8 dan 9 dimana ekoturisme tersebut diklaim akan dapat membantu pariwisata berkelanjutan di wilayah tersebut. Kenyataannya, peneliti justru menyimpulkan bahwa manfaat dari ekoturisme TN Komodo ini hanya dinikmati oleh segelintir keluarga saja. Sebagian besar warga lainnya terbukti sulit untuk beradaptasi dengan “*seasonality and unpredictability of tourism industry*”. Dengan kata lain, pencapaian SDG target 8 dan 9 justru berdampak buruk bagi pencapaian target 1 (pengurangan kemiskinan) dan 10 (pengurangan ketimpangan).

target SDGs. Dalam melakukan evaluasi terhadap capaian SDGs Desa, penting untuk membentuk “forum” yang tepat dan efektif untuk mendapatkan umpan balik dari warga desa atas proses pembangunan yang mereka alami dan rasakan.

Ketiga, pelokalan SDGs Desa tidak cukup dengan hanya menurunkan beragam indikator SDGs ke level desa, lebih dari itu, perlu memasukkan faktor/variabel/dimensi lain yang relevan. Misal, dimensi politik lokal, kepemimpinan desa, struktur dan kelembagaan informal yang berpengaruh, jejaring perempuan, praktek hidup dan perilaku sehari-hari, *mindset*, dan lain sebagainya. Pendekatan kualitatif (*place-based community research*) akan lebih mampu membedah hal ini dan menjadi pelengkap indikator kuantitatif SDGs Desa lainnya.



Gambar 3. Pendekatan kualitatif untuk memahami implementasi SDGs Desa

Kedua, secara metodologi, penting untuk menggunakan pendekatan *place-based community research* untuk memetakan keterhubungan antar indikator SDGs. Pendalaman perlu dilakukan kasus per kasus, program per program, dengan menempatkan proses sebagai narasi utama dalam pencapaian

Keempat, fokus pada kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*). Implementasi SDGs Desa pastilah berhadapan dengan banyak masalah dan tantangan, baik masalah baru maupun masalah laten yang sudah eksis di

Desa selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, pengambil kebijakan – dari pusat hingga level desa – harus jeli dalam melihat kekuatan dan peluang, lalu menjadikannya sebagai modal untuk mencapai target SDGs yang menjadi prioritas bersama.

Senada dengan berbagai penekanan akan pentingnya pendekatan kualitatif di atas, buku ini berusaha mencari jawaban tentang bagaimana pengarusutamaan gender dalam praktek-praktek pembangunan berkelanjutan di tingkat desa di Indonesia? Kumpulan praktik

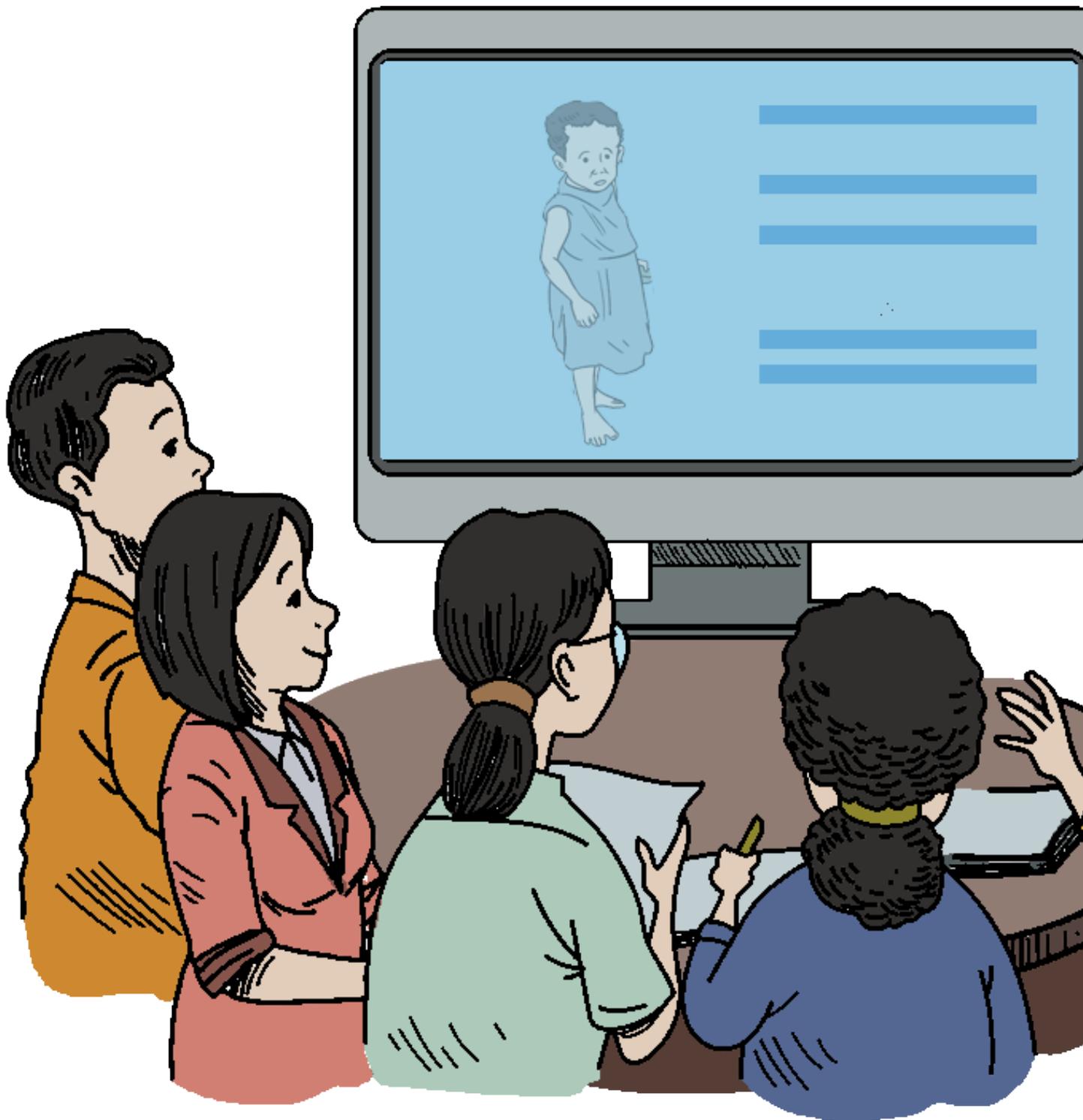
baik (*best practices*) dari sepuluh (10) desa yang didampingi oleh Kalyanamitra, menjadi pintu masuk untuk lebih memahami proses mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di level desa tersebut. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif terhadap implementasi SDGs Desa untuk memperoleh gambaran konstruksi sosial dari warga desa terkait SDGs Desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini adalah melakukan pemetaan melalui Diskusi Terpumpun (FGD), observasi langsung oleh para pendamping desa di lapangan, wawancara mendalam, dan tinjauan literatur.

Tabel 3. Jumlah peserta FGD SDGs Desa di sepuluh desa

No	Desa	Jumlah Peserta FGD	Peserta Laki-Laki	Peserta Perempuan
1	Banjararum	10 orang	4 orang	6 orang
2	Kuanek	12 orang	6 orang	6 orang
3	Pringgasela Selatan	17 orang	12 orang	5 orang
4	Babakan Gebang	10 orang	4 orang	6 orang
5	Ajaobaki	13 orang	8 orang	5 orang
6	Banjarharjo	10 orang	4 orang	6 orang
7	Batutulis	10 orang	5 orang	5 orang
8	Oesena	14 orang	6 orang	8 orang
9	Pugung Raharjo	11 orang	5 orang	6 orang
10	Sidorejo	10 orang	6 orang	4 orang

Sumber: Dok Penulis





TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Desa Berjuang Melawan Stunting

“Childhood stunting is the best overall indicator of children’s well-being and an accurate reflection of social inequalities”[15]



Stunting merupakan sebuah kondisi gagal pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak-anak (*linier growth failure*) [16]. Penyebabnya beragam, seperti kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan¹⁷. Indonesia masih memiliki angka prevalensi stunting cukup tinggi, yaitu 24,4 persen dan berada di atas angka standar yang ditoleransi WHO, yaitu di bawah 20 persen¹⁸. Hal ini dikarenakan tingginya angka anemia dan kurang gizi pada remaja putri sebelum menikah sehingga pada saat hamil menghasilkan anak stunting. Riset-riset terkait penyebab stunting di Indonesia juga rata-rata menunjukkan bahwa tinggi badan dan pendidikan ibu, kelahiran prematur dan panjang lahir, ASI eksklusif selama 6 bulan, serta status sosial ekonomi rumah tangga masih menjadi faktor diteriman penyebab stunting di Indonesia[17].

17 <https://paudpedia.kemdikbud.go.id/berita/prevalensi-stunting-indonesia-2022-masih-dia-tas-standar-who-37-pasangan-usia-subur-alami-anemia?id=812&ix=11>

18 <https://www.detik.com/jateng/berita/d-5963721/angka-stunting-di-indonesia-244-bkkbn-melebihi-standar-who>

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebut masih terdapat remaja putri usia 15-19 tahun dengan kondisi berisiko kurang energi kronik sebesar 36,3%, wanita usia subur 15-49 tahun dengan risiko kurang energi kronik sebanyak 33,5% dan mengalami anemia sebesar 37,1%. Secara Nasional pemerintah telah mengeluarkan Perpres no 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Bahkan, saat ini sudah terbentuk 200 ribu Tim Pendamping Keluarga atau 600 ribu orang yang bertugas untuk melakukan pendampingan kepada remaja/calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0-59 bulan, sehingga diharapkan mereka memiliki pemahaman yang cukup dalam upaya pencegahan stunting.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) pun diamanati untuk mendukung desa dalam berperang melawan stunting ini. Misalnya dengan mendorong penggunaan Dana Desa dalam mendukung kegiatan pencegahan stunting, memastikan tersedianya lima layanan dasar di desa yaitu layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Konseling Gizi Terpadu, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, Perlindungan Sosial dan Kesehatan, serta Layanan PAUD. Pemerintah juga diminta untuk memastikan kelompok 1000 HPK (seribu hari pertama kehidupan) dapat mengakses lima layanan dasar tersebut. Strategi yang dilakukan tentu saja dengan mengoptimalkan peran Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebagai kader yang ditugaskan secara khusus untuk mendata sasaran dan memantau layanan di desa.

Saat ini, hampir semua desa (96,9%) telah memiliki Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan mereka rutin melakukan pendataan sasaran 1000 HPK dengan menggunakan aplikasi

berbasis android bernama *electronic Human Development Worker* (eHDW). Melalui aplikasi eHDW, diharapkan laporan konvergensi layanan pencegahan stunting di desa dapat dipantau secara rutin setiap triwulan melalui *dashboard* yang dapat diakses oleh kabupaten, provinsi, dan pusat. Hingga akhir tahun 2020, sebanyak 40.121 desa (53%) sudah menggunakan aplikasi eHDW dan tingkat konvergensi layanan di desa secara nasional sebesar 43,08%. Pandemi Covid-19 turut mempengaruhi capaian ini karena layanan Posyandu dan PAUD desa tidak dapat dilaksanakan secara rutin untuk menjangkau semua sasaran.

Perjuangan dalam menghadapi stunting ini pun menjadi perhatian dan prioritas banyak desa dan kelurahan di Indonesia, salah satunya adalah di kelurahan Banjararum, Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, DIY. Banjararum sendiri terdiri dari 26 Padukuhan, 52 Rukun Warga (RW) dan 104 Rukun Tetangga (RT). Dulu, sekitar tahun 2017, program penanganan gizi kurang diberikan oleh Kelurahan dalam bentuk PMT (Pemberian Makanan Tambahan) yang berwujud uang untuk balita-balita yang mengalami gizi kurang. Namun setelah dievaluasi, ternyata PMT dalam bentuk uang tunai ini tidak menunjukkan kenaikan berat badan balita yang mengalami gizi kurang secara signifikan. Setelah ditelusuri, yang terjadi di lapangan ternyata uang yang seharusnya dibelanjakan untuk penanganan balita gizi kurang tidak digunakan sesuai tujuan, karena dibelanjakan oleh orang tuanya untuk kebutuhan lainnya.

Pada tahun berikutnya (2018), Kelurahan Banjararum kembali menganggarkan PMT, namun kali ini tidak diberikan dalam bentuk uang tunai. PMT diberikan dalam bentuk bahan pangan mentah berupa telur, kacang hijau,



Gambar 4. Lurah Banjararum bersama ibu dan balita di Pos Gizi

beras merah dan lain sebagainya. Kelurahan kembali melakukan evaluasi. Ternyata, masih juga perbaikan program ini belum tepat sasaran. Bahan mentah yang diberikan tidak hanya di konsumsi oleh balita yang mengalami gizi kurang, tetapi juga dikonsumsi oleh anggota keluarga lainnya. Hal itu terjadi karena di rumah “*ya mbah e, kakak e do maem*” (ya kakek maupun kakaknya ikut makan). Padahal mereka tidak termasuk sasaran PMT.

“Nah dengan seperti itu saya dengan Kalyanamitra dan ibu-ibu kader penggerak terus mencari inovasi-inovasi lainnya yang berharap bisa tepat sasaran. Dari Puskesmas juga memberikan indeks makan tambahan bagi balita gizi buruk. Disitu saya menemukan model untuk menganggarkan makanan tambahan dari balita yaitu dengan kegiatan pos gizi, dimana anak-anak yang mengalami gizi kurang di kumpulkan dalam satu tempat untuk diajak makan bersama” (Lurah Banjararum).

Dari dua pengalaman tersebut, muncul gagasan untuk membentuk Pos Gizi, dimana ibu dan balita kurang gizi dikumpulkan dan diberikan PMT secara bersama-sama. Pada awal program, Kelurahan Banjararum memiliki 5 pos gizi. Langkah ini dilakukan karena Banjararum memiliki 26 padukuhan. Jadi, padukuhan yang lokasinya berdekatan dikumpulkan ke dalam satu Pos Gizi untuk makan bersama. Setelah 10 hari PMT dan 10 hari berhenti, hasil evaluasi menunjukkan kenaikan yang cukup bagus. Ketika ditambah lagi 10 hari, kenaikannya semakin bagus. Dari sini kemudian program Pos Gizi ini terus dilanjutkan sebagai upaya melawan stunting.

Kegiatan *kumbo nambo* ini dianggap lebih efektif jika dibandingkan dengan pemberian bahan makanan mentah. Ketika anak-anak dikumpulkan dalam satu tempat lalu makan bersama, maka kader-kader Posyandu bisa memantau dan memastikan kalau makanan



Gambar 5. Pemberian Makanan Tambahan untuk Anak Gizi Kurang di Banjararum

tersebut memang dikonsumsi oleh si anak. Disisi lain, orang tua juga lebih tertarik dan semangat dengan kegiatan makan bersama karena anak-anaknya jadi lebih bersemangat makannya serta mereka pun mendapatkan pengetahuan baru tentang aneka jenis makanan dan cara pengolahannya.

Dalam perjalanannya, pemerintah di Kelurahan dan para kader penggerak pun menyadari bahwa ternyata penanganan stunting tidaklah cukup dengan pemberian makanan bergizi saja. Penanganan stunting haruslah dimulai dari ketika bayi masih berada dalam kandungan Ibu. Berangkat dari kesadaran tersebut, muncul program berikutnya yaitu kegiatan kelas bumil (ibu hamil). Pihak Kelurahan pun menganggarkan untuk kegiatan tersebut. Selain kelas ibu hamil, ada juga kelas bapak siaga. Dalam kegiatan ini, bapak-bapak yang istrinya sedang hamil diundang dan diberikan pemahaman terkait stunting.

Dalam perjalanannya, Kelas Ibu Hamil dan Kelas Bapak Siaga pun masih dianggap belum cukup menjawab persoalan stunting dan gizi kurang, ada tahapan lain yang harus dilakukan bahkan sebelum calon orang tua menjadi pasangan, yaitu pembekalan calon pengantin. Pada tahun 2019, bersama dengan Kalyanamitra, pihak Kelurahan Banjararum mendiskusikan konsep terkait dengan Pendidikan bagi calon pengantin. Pembekalan calon pengantin ini penting untuk menyiapkan keluarga dan orang tua agar memahami resiko stunting dan pencegahannya. Kegiatan pembekalan bagi calon pengantin ini juga melibatkan beberapa pemangku kepentingan lainnya.

Salah satu yang bisa dipetik dari praktik baik penanganan stunting di Kelurahan Banjararum ini adalah pentingnya kemauan dan kepemimpinan yang kuat di tingkat desa/ kelurahan dalam upaya menangani stunting. Terutama dalam hal penganggaran program.



Gambar 6. Suasana penimbangan berat badan balita di Banjararum

Tak cukup hanya dengan penganggaran secara rutin, tetapi juga kemauan untuk melakukan evaluasi dan inovasi terhadap program yang dijalankan. Perbaikan terus menerus hingga ditemukan formula terbaik yang sesuai dengan situasi dan kondisi desa atau kelurahan tersebut adalah prasyarat dalam mencapai tujuan. Bisa jadi model Pos Gizi Banjararum ini tidak cocok untuk diterapkan di tempat lain karena, situasi dan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, setiap desa atau kelurahan perlu memahami betul apa dan bagaimana sebuah program bisa tepat sasaran?

Selain itu, semangat Banjararum untuk terus melakukan kolaborasi dengan mitra organisasi non-pemerintah (Kalyanamitra), patut diacungi jempol. Hal ini merupakan wujud keterbukaan pemerintah desa/kelurahan sekaligus membuka ruang partisipasi warga menjadi lebih baik. Ragam program yang ditawarkan, mulai dari PMT, Pos Gizi, Kelas Bumil, Kelas Bapak Siaga,

dan Kelas Calon Pengantin, menunjukkan sebuah upaya yang komprehensif dan melibatkan sebanyak mungkin aktor perubahan di tingkat desa. Peran dan dedikasi kader-kader Posyandu Banjararum dalam memfasilitasi dan mendukung Pos Gizi juga layak untuk ditiru, sehingga hasil dari PSG (Pemantauan Status Gizi) Balita dapat tersambung dengan baik untuk kesuksesan program Pos Gizi.

Meskipun demikian, bukan berarti perjuangan melawan stunting dan mencapai SDGs Desa ini tanpa hambatan sama sekali. Pandemi COVID-19 sedikit banyak telah menghambat implementasi program, meskipun tidak sampai terhenti total. Di sisi lain, banyak pasangan kurang memberikan pengawasan kepada anak-anaknya, terutama anak-anak remaja. Masih banyak pergaulan anak remaja yang beresiko mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) dan pola asuh orang tua yang masih belum ideal, terutama adalah anak-anak yang dititipkan

pada *simbah*-nya. Kebanyakan keluarga di desa masih menyepelekan persoalan pengasuhan anak ini.

“Ada beberapa faktor kenapa anak masuk kategori stunting, misalnya kader tidak pas saat mengukur. Kami, Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), akan melihat sampai 3 kali pengukuran, jika tidak ada kenaikan maka kami akan datang dan menggali masalahnya apa?” (Kader Posyandu)

Menurut penuturan kader, dulu ketika masih dalam pola Pemberian Makanan Tambahan (PMT), ada anak stunting tetapi malah tidak mendapat jatah. Hal ini terjadi karena dari pihak Puskesmas diprioritaskan untuk anak yang tinggi badannya kurang. Ada anak yang berat badannya bagus, tetapi stunting, tidak masuk prioritas. Sebagai langkah perbaikan, ke depan untuk PMT gizi kurang maupun stunting, kader akan menimbang dari BB/TB (berat badan/tinggi badan), BB/U (Berat Badan/Umur) dan TB/U (Tinggi Badan/Umur).

Aplin & Nofriyanto (2019) telah melakukan survey kepada 73 sampel balita stunting di Desa Banjararum dengan menggunakan instrumen *Denver Development Screening Test* (DDST). Hasil penelitian penelitian tersebut menunjukkan gambaran perkembangan pada balita stunting di Desa Banjararum sebagian besar normal, yaitu motorik halus 82,2%, motorik kasar 95,9%,

bahasa 71,2%, dan personal sosial 72,6%[18]. Dengan kata lain, sebagian besar balita stunting di wilayah kerja Puskesmas Kalibawang Kulon Progo Yogyakarta perkembangannya masih relatif normal dilihat dari aspek motorik halus, motorik kasar, bahasa, dan personal sosial. Meskipun demikian, perkembangan balita stunting ini perlu terus dimonitor dan mendapatkan perhatian khusus.

Faktor lain yang menjadi penyebab stunting dan perlu ditangani adalah kesenjangan ekonomi dan relasi antara suami dan istri yang kurang kompak dalam mengasuh anak dan mengelola rumah tangga. Stress/tekanan yang dialami perempuan ketika hamil muda juga bisa menjadi faktor penyebab anak yang dilahirkan mengalami stunting. Pengasuhan anak yang masih banyak dibebankan pada ibu juga menjadi akar masalah (hal ini termasuk dalam kategori ketimpangan gender) yang perlu ditangani. Meski program penanganan stunting sudah bagus, tetapi ada persoalan yang saat ini masih terjadi di masyarakat, yaitu pembagian peran yang tidak seimbang di dalam rumah tangga seperti tugas pengasuhan anak yang masih dibebankan pada ibu/perempuan saja. Hasil riset juga menunjukkan bahwa pemberian ASI Eksklusif dan pendapatan keluarga merupakan faktor yang berpengaruh secara tidak langsung[19]. Oleh karena itu, pencapaian target penanganan stunting (Desa Peduli Kesehatan/SDGs 3,6,11) tidaklah bisa berdiri sendiri, melainkan akan selalu tergantung atau terkait dengan pencapaian tujuan SDGs Desa lainnya, seperti desa ramah perempuan dan anak (SDGs 5), desa tanpa kemiskinan dan kelaparan (SDGs 1,2), serta desa tanpa kesenjangan ekonomi (SDGs 8,9,10,12).

Upaya Desa Menurunkan Kekerasan Berbasis Gender (KBG)

The COVID-19 pandemic exposes underlying inequalities in our socio-economic and health systems, such as gender-based violence (GBV). In emergencies, particularly ones that involve quarantine, GBV often increases [20].

Komnas Perempuan, melalui CATAHU 2022, mencatat sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan dengan rincian, pengaduan ke Komnas Perempuan 3.838 kasus, lembaga layanan 7.029 kasus, dan BADILAG 327.629 kasus [21]. Angka pengaduan ini meningkat secara tajam hingga 50% yaitu 338.496 kasus pada 2021 dari 226.062 kasus pada tahun 2020. Lonjakan tajam terjadi pada data BADILAG sebesar 52%, yakni 327.629 kasus dari 215.694 kasus pada tahun 2020. Dilihat dari sisi kewilayahan, Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat pertama kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dengan jumlah 58.395 kasus, disusul Jawa Timur dengan 54.507 kasus, dan Jawa Tengah dengan 52.697 kasus. Peningkatan KBG ini tentu saja menjadi perhatian banyak pihak karena menunjukkan situasi perlindungan terhadap perempuan yang masih belum membaik.

Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak

Beberapa desa pun tergerak dan memulai inisiatif untuk turut serta dalam upaya menurunkan KBG ini di desa atau kelurahannya masing-masing. Seperti yang dilakukan oleh Desa Kuanek dan Desa Ajaobaki di Nusa Tenggara Timur. Desa Kuanek merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Desa Kuanek memiliki luas wilayah 17,5 km² dengan topografi berbukit. Desa Kuanek dihuni oleh sekitar 161 KK atau 553 jiwa (Laki-Laki berjumlah 272 jiwa dan perempuan berjumlah 281 jiwa) yang tersebar di 8 RT, 4 RW dan 4 Dusun.

Untuk menuju ke Desa Kuanek dari ibukota Kabupaten TTU bisa ditempuh melalui jalur darat dengan menggunakan kendaraan roda dua atau kendaraan roda empat. Jarak dari Desa Kuanek ke ibukota kabupaten kurang lebih 10 km. Jika ditempuh menggunakan kendaraan roda dua akan membutuhkan waktu sekitar 30 menit dan 45 menit menggunakan kendaraan roda empat. Jarak Desa Kuanek ke Kecamatan sekitar 5 Km dengan waktu tempuh 15 menit menggunakan kendaraan roda dua. Untuk menuju ke Ibu Kota Propinsi, warga harus menempuh jarak 260 km atau setara 7-8 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda empat dengan melalui medan yang berbukit-bukit.

Penduduk Desa Kuanek mempunyai mata pencaharian utama petani dan sebagian kecil adalah guru, PNS, tukang, yang tingkat pendidikannya rata-rata SMP (50%) dan SD (30%.) Komoditi pertanian yang ditanam oleh masyarakat adalah padi ladang, jagung, ubi kayu, kacang-kacangan. Ada pula hasil tanaman hutan seperti asam, kemiri, dan

jambu mente. Hasil pertanian inilah yang digunakan masyarakat Desa Kuanek untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Di sela-sela kesibukan mempersiapkan lahan pertanian, masyarakat Desa Kuanek biasanya mengisi waktu luang untuk mendapatkan uang dari pekerjaan sampingan. Laki-laki biasanya menjadi tukang ojek atau tukang bangunan, baik di dalam desa maupun di luar desa. Ada juga aktivitas menanam sayur yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki, tergantung minat masing-masing orang. Hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk menambah penghasilan rumah tangga mereka selain dari pekerjaan pokok.

Masyarakat Desa Kuanek pada umumnya masih menganut budaya orang Dawan (*Atoin Meto*). Dalam budaya ini, semua hal yang berkaitan dengan harta peninggalan orang tua dikuasai oleh laki-laki, sehingga anak laki-laki meskipun paling kecil (*bungsu*), sangatlah dihargai dan mendapat kedudukan istimewa dalam keluarga tersebut. Istilah rumah tangga (*ume Nakaf*) dalam pandangan masyarakat Desa Kuanek yaitu kumpulan beberapa orang antara lain bapak, mama, dan anak-anak yang tinggal di dalam satu rumah tangga yang kepala keluarganya seorang bapak. Seorang laki-laki atau bapak dikatakan sebagai kepala rumah tangga karena laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama atau dengan istilah Dawan (*Atoni Nabiko ma Na'ne Nabi Suf ma Aut'fin*), sedangkan perempuan atau mama dianggap sebagai orang yang bertugas untuk menyalakan api dan lampu atau dengan istilah dawan (*Bife Apin Paku Ma Ahoit Ai*).

Terkait dengan KBG, di Desa Kuanek tercatat pernah terjadi kasus kekerasan seksual (perkosaan) sebanyak 1 kasus di tahun 2019 dan

kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 27 kasus pada rentang tahun 2017 – 2021. Angka ini tentu menunjukkan kondisi yang cukup rawan dan memprihatinkan untuk ukuran sebuah desa. Berangkat dari permasalahan tersebut, Pemerintah Desa (Pemdes) Kuanek pun berinisiatif untuk membuat kebijakan yang lebih responsif gender, yakni dengan membantuk Paralegal atau Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat desa serta memberikan pelatihan dan pembekalan pada mereka. Pemdes Kuanek pun menyiapkan anggaran desa yang berpihak pada perempuan dan kelompok rentan dari anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Unsur-unsur yang terlibat dalam forum paralegal/satgas tersebut adalah tokoh Adat, tokoh perempuan, tokoh Pemerintah, dan tokoh Agama.

Pemdes Kuanek secara aktif melakukan sosialisasi tentang upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di desa melalui perayaan hari keagamaan bagi umat katolik, seperti pada hari raya Natal, perayaan paskah dan Bulan Kitab Suci Nasional. Ada pula kampanye berupa pemutaran Film Tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Program ini pun dianggap berhasil dan mendapat apresiasi karena adanya dukungan operasional dari pemerintah desa melalui dana Desa untuk Paralegal/Satgas.



Gambar 7. Ketua Paralegal Desa Kuanek, TTU

“Awalnya, sebelum ada Paralegal banyak kasus yang terjadi di desa, namun sejak ada paralegal kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menurun; oleh karena warga desa sudah

mengetahui ada paralegal yang mendampingi korban. Kaum perempuan telah berani melaporkan kasus yang dialaminya, bahkan kami juga menerima laporan dan mendampingi kasus dari desa tetangga. Sebagai Paralegal, kami bisa memulai karena dukungan pihak lain. Pihak lain yang dimaksud di sini adalah keluarga, Pemerintah, LSM (Konsorsium TAS NTT melalui YABIKU NTT) dan masyarakat sekitar. Keluarga kami baik istri ataupun suami sangat mengerti dengan tugas yang kami lakukan. Pengertiannya mereka tunjukkan melalui sikap bahkan terkadang suami turut mengantar kami dalam pendampingan korban. Dukungan suami atau istri atas apa yang kami lakukan sangat berarti bagi perjuangan perempuan korban tindak kekerasan. Konsorsium Timor adil dan Setara NTT melalui YABIKU NTT ini sangat membantu kami untuk banyak hal. Sebut saja bagaimana kami dikapasitasi tentang ilmu keparalegalan. Selain itu ada juga teknikal asistensi yang kami dapatkan berbasis kebutuhan. Jika kami kesulitan mengidentifikasi kasus, bagaimana menulis kronologis kasus secara baik dan benar, strategi mendampingi korban tindak kekerasan dan lainnya yang kami butuhkan dalam tugas pendampingan kami. Ada juga diskusi tematik yang kami lakukan bersama YABIKU NTT dan kelompok masyarakat kami. Diskusi tentang gender, Kekerasan terhadap Perempuan/Anak serta materi diskusi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan kelompok masyarakat kami. Selain itu juga kami di fasilitasi oleh KTAS NTT bersama pemerintah desa membuat SOP” (Kanisius Nino, 45 Tahun, Paralegal Desa Kuanek, TTU).

Menurut penuturan warga desa Kuanek, dahulu jika ada masalah KDRT, masyarakat akan berkata:

“Tidak perlu ikut campur, itu kan urusan mereka”, Tetapi sekarang, jika ada kasus, masyarakat

pun turut membantu melaporkan, termasuk tentang keberadaan pelaku dan membantu Paralegal mengkomunikasikan dengan pihak keluarga (Pelaku maupun korban). Secara hukum, Satgas/Paralegal ini pun pengakuan dari pemerintah kabupaten berupa diterbitkannya SK Bupati. Mereka juga telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) paralegal/Satgas Penanganan Korban Kekerasan di Tingkat Desa yang sudah di setujui oleh Pemdes.



Gambar 8. Anggota Paralegal Desa Kuanek, TTU

“Sebagai orang yang peduli terhadap korban tindak kekerasan, kami anggota Paralegal Desa Kuanek memiliki kemauan untuk membantu sesama kami yang mengalami perlakuan tidak adil, terutama

kaum perempuan dan anak. Kemauan kami tidak sebanding dengan pengetahuan dan ketrampilan yang kami miliki. Ada yang tamat Sekolah Dasar, ada juga yang tamatan Sekolah Menengah Pertama dan satu atau dua orang saja yang tamatan Sekolah Menengah Atas. Keragaman latar belakang pendidikan kami, tidak membuat kami patah arang. Kami bahkan lebih bersemangat untuk mencari tahu dan lebih banyak belajar tentang bagaimana seharusnya mendampingi korban secara baik dan benar. Faktor kerentanan yang menyebabkan terjadinya KDRT di desa Kuanek antara lain faktor kesenjangan antara pelaku dan korban, misalnya pendidikan” (Emilia Binsasi, 46 tahun, anggota paralegal desa kuanek).

Pada umumnya, dalam kasus KBG yang terjadi di desa Kuanek, menunjukkan indikasi bahwa tingkat pendidikan pelaku kekerasan

biasanya lebih tinggi dari korban. Hal ini yang menyebabkan pelaku selalu menuntut untuk dihargai. Selain pendidikan, ada juga faktor lain misalnya faktor pekerjaan (ekonomi), juga masuk sebagai faktor kerentanan terjadinya KDRT. Rata-rata pekerjaan pelaku hanya sebagai petani yang tidak bisa menghasilkan uang setiap hari untuk menafkahi keluarga, akan tetapi ada juga yang memiliki pekerjaan sampingan yang dapat menghasilkan uang setiap hari meskipun nilainya sedikit, misalnya ojek, jual sayur, buruh bangunan dan lain sebagainya. Dalam hal ini, baik pelaku maupun korban yang memiliki pekerjaan tetap dan menghasilkan uang sama-sama minta untuk dihargai di dalam keluarga karena mereka adalah pencari nafkah utama.

Selain itu, ada juga beberapa hal yang menjadi pemicu terjadinya KDRT di Desa Kuanek antara lain adalah pelaku pulang dalam keadaan mabuk minuman beralkohol karena pelaku memang memiliki kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol. Sayangnya, riset-riset terkait KBG seperti ini masih jarang dilakukan dan kalau pun ada, seringkali hanya pada lingkup geografis dan demografis yang kecil[22]. Diperlukan lebih banyak perhatian dan riset terkait KDRT dan KBG pada umumnya dengan skala yang lebih luas di Indonesia.

Perubahan positif terhadap relasi gender di tengah Desa Kaunek juga ditandai dengan hadirnya Laki-Laki Baru (LLB). Hadirnya LLB ini untuk mendorong perempuan agar bebas dari kekerasan dan ketidakadilan dan terus mendorong perempuan untuk berdaya secara ekonomi serta mendukung kepemimpinan perempuan di tingkat desa. Selain itu, hadirnya LLB juga untuk mengubah cara pandang masyarakat bahwa pekerjaan – pekerjaan domestik atau rumah tangga itu bukan

tanggung jawab perempuan saja, tetapi itu merupakan pekerjaan bersama. Terkait dengan SDGs Desa, Pemdes Kuanek sejauh ini mengaku belum banyak mendapatkan sosialisasi dan pelatihan terkait SDGs Desa ini, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Padahal aksi dan program yang mereka lakukan sangatlah sesuai dengan salah satu tujuan dan tipe SDGs Desa, yaitu desa ramah perempuan.

“Harus ada pembagian peran yang adil dalam rumah. Kami sebagai laki-laki sangat senang dengan pekerjaan yang kami lakukan ini seperti cuci piring karena ini juga merupakan bagian dari tanggung jawab kami sebagai sebagai kepala Keluarga”.
(Mikhael Besa, 52 Tahun anggota LLB)



Gambar 9.
LLB di Desa
Kuanek

Seperti halnya di Desa Kuanek, TTU, praktik baik serupa juga muncul di Desa Ajaobaki, TTS. Menurut penuturan warga, kehadiran Sanggar Suara Perempuan (SSP) di Desa Ajaobaki sudah 50% membantu masyarakat. Sebelumnya, kekerasan terhadap perempuan dan masalah KDRT dipahami sebagai masalah internal keluarga dan tidak boleh ada pihak luar yang ikut campur bila terjadi kekerasan. Tetapi, dengan kehadiran SSP di desa Ajaobaki, maka semua elemen masyarakat telah mengetahui tentang masalah kekerasan sampai pada perumusan Peraturan Desa. Program/Inovasi Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di Desa Ajaobaki adalah dengan melahirkan Peraturan Desa tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Perdes Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan. Bahkan, sejak perumusan Perdes ini, perempuan selalu terlibat sampai pada tahapan implementasi. Dalam penyelesaian kasus-kasus KDRT, Perdes menjadi acuan sehingga kasus KDRT mulai berkurang drastis saat ini.

Program/Inovasi Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di Desa Ajaobaki dianggap berhasil karena semua unsur dalam desa memiliki komitmen yang sama untuk mencegah terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Sosialisasi Peraturan Desa tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dilakukan secara terus menerus dalam pertemuan-pertemuan rutin, baik di gereja maupun pemerintah. Konseling bagi pasangan pra-nikah juga menjadi salah satu program desa yang sudah dilakukan sejak tahun 2010. Di dalamnya, konseling diisi dengan materi tentang kekerasan dalam rumah tangga, kesetaraan gender dan masalah sosial lainnya yang terjadi di desa.

Banyak pihak dan pemangku kepentingan yang mendorong keberhasilan dalam upaya mewujudkan Desa yang lebih ramah kepada perempuan dan anak. Pemerintah Desa dan BPD berperan sebagai perencana dan pelaksana program. Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan tetua Adat, Tokoh Perempuan, dan Karang Taruna (pemuda) sebagai mediator. Lalu, Sanggar Suara Perempuan sebagai Fasilitator dan pihak Kepolisian (Polsek) sebagai mediator dan penyidikan. Tak hanya terkait KBG, dukungan kepada perempuan juga ditunjukkan oleh Pemerintah Desa Ajaobaki melalui beragam program yang bersumber dari Dana Desa, seperti pembentukan dan pendampingan pada Kelompok Wanita Tani (KWT), Kelompok Tenun, Kelompok Perikanan, Insentif Kader Posyandu, Insentif Tenaga Kesehatan Desa (TKD), Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), Pengajar PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), Pengolahan Pangan Lokal, PMT bagi anak stunting dan ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan ibu menyusui.

Selain itu, perempuan di Desa Ajaobaki juga selalu dilibatkan dalam berbagai kegiatan rutin di Desa maupun di luar desa dan memberi kesempatan seluas-luasnya bagi perempuan untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Dusun, KAUR Keuangan, Sekretaris Desa, Badan Perwakilan Desa, ketua RT, ketua Kelompok, dan guru. Dalam setiap kegiatan Desa, perempuan secara aktif turut berbicara, mengusulkan gagasan, sekaligus ikut dalam pengambilan keputusan.

Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)

Progress on gender equality has been too slow, too fragile, and too fragmented: there was little progress on gender equality at a global level between 2015 and 2020[6].

Mimpi mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) tentu tidak hanya dimiliki oleh Desa Kuanek dan Ajaobaki saja. Kelurahan Banjarharjo di Yogyakarta dan Desa Babakan Gebang, di Cirebon, Jawa Barat juga berupaya melakukan hal yang sama. Banjarharjo adalah sebuah desa di kecamatan Kalibawang, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Dalam proses menjadi DRPPA, Banjarharjo banyak mendapat pendampingan dari Kalyanamitra, sebuah lembaga non-profit yang fokus pada peningkatan kesetaraan gender di Indonesia. Kalyanamitra sendiri telah melakukan program pendampingan di Banjarharjo selama 3 tahun. Gagasan terkait RPPA ini pada saat dikenalkan masih belum dianggap belum *urgent* atau mendesak oleh pemerintah Banjarharjo. Tetapi kini, seiring berjalannya waktu, ide itu disadari sangat penting dan menjadi kebutuhan pemerintah, utamanya terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Saat ini, Kelurahan Banjarharjo sudah membentuk Forum Perlindungan Korban

Kekerasan (FPKK) hingga di tingkat padukuhan. Hal ini dilakukan dalam rangka mendekatkan FPKK agar apabila terjadi kasus kekerasan, seperti KDRT, maka kasus bisa lebih cepat diatasi di tingkat padukuhan. Saat ini masih banyak masyarakat yang menutup rapat masalah rumah tangga. Mereka lebih nyaman untuk menyelesaikannya di lingkup rumah tangga. Terutama jika terkait dengan KDRT, hal ini sering kali masih dianggap urusan internal, aib, dan tabu untuk disampaikan.

Banjarharjo menjadi DRPPA melalui proses yang sangat panjang. Ada 10 syarat atau indikator untuk bisa menjadi Desa RPPA, antara lain:

- 1 Adanya pengorganisasian perempuan dan anak di desa
- 2 Tersedianya data desa yang memuat data pilah tentang perempuan dan anak
- 3 Tersedianya peraturan Desa tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak
- 4 Tersedianya pembiayaan dari keuangan desa dan pendayagunaan aset desa untuk mewujudkan DRPPA melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa
- 5 Persentase keterwakilan perempuan di pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat desa
- 6 Persentase perempuan wirausaha di desa, utamanya perempuan kepala keluarga, penyintas bencana, dan penyintas kekerasan
- 7 Semua anak mendapatkan pengasuhan yang baik, yang berbasis hak anak
- 8 Tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTPA) dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO)
- 9 Tidak ada pekerja anak
- 10 Tidak ada yang menikah di bawah usia 19 tahun (tidak ada perkawinan anak)

Tentu saja tidak mudah untuk memenuhi kesepuluh syarat di atas. Namun demikian, Kelurahan Banjarharjo telah memiliki pengalaman panjang dan mendapatkan pendampingan sejak lama. Pada tahun 2004, misalnya, Banjarharjo pernah mendapatkan penyuluhan dan pelatihan gender yang diinisiasi oleh penyuluh pertanian yang diampu oleh salah satu Perguruan Tinggi pertanian di Jogja. Pada saat itu, ada dana sekitar Rp. 130 juta, yang kemudian digunakan untuk mengadakan pelatihan-pelatihan *home industry*, manajemen dan pelatihan tentang gender. Setelah 6 tahun berjalan, kemudian program berhenti karena permasalahan keuangan tidak berjalan dengan baik.

Dana yang pada saat itu dialokasikan, selain digunakan untuk keperluan pelatihan *home industry*, sebagian juga digunakan untuk membeli peralatan-peralatan *home industry*, seperti kompor, wajan, dan lain sebagainya. Pada tahun-tahun berikutnya, Pemdes Banjarharjo juga menganggarkan kegiatan yang berhubungan dengan isu gender dan perempuan. Akan tetapi, sejauh ini kelurahan belum memiliki rekening kegiatan yang berjudul penanganan gender. Hal ini berbeda dengan penanganan stunting yang sudah ada rekeningnya.

Kegiatan dan program lain yang ditujukan untuk pemberdayaan perempuan, antara lain: KWT, Desa Prima, Kader PKK dan Posyandu. Melalui Posyandu, Kelurahan memfasilitasi kader untuk mengadakan penyuluhan dan pembinaan terhadap perempuan-perempuan di padukuhan dengan dilaksanakannya posyandu untuk memperhatikan anak-anak kecil, dari bayi hingga anak usia 5 tahun. Kegiatan lain yang berkaitan dengan kesehatan

juga telah diupayakan berbagai program sanitasi. Sejauh ini, 35 orang mendapat bantuan MCK pada setiap tahunnya, meskipun belum selesai sepenuhnya, akan tetapi Banjarharjo terus bermitra dengan lembaga lain untuk bisa memenuhi target tersebut. Hal ini dilaksanakan agar masyarakat Banjarharjo bisa mencapai PHBS, begitu halnya dengan PAMSIMAS dan penyediaan air bersih.

Pada tahun 1990an, masyarakat Banjarharjo masih membeli air dengan harga yang mahal. Berbeda dengan sekarang yang hanya seharga Rp. 3 ribu rupiah per kubik, yang mana harganya tidak terlalu jauh dari PDAM. Sampai saat ini, sudah tidak ada bantuan air bersih dalam bentuk tangki di Banjarharjo, hal ini ini menandakan bahwa air bersih, secara umum, sudah cukup. Dalam bidang pendidikan, sampai saat ini diberikan pembiayaan kelas ibu hamil dengan tujuan untuk memberikan pendidikan terkait anak dalam kandungan. Sehingga ibu akan tahu bagaimana perkembangan anaknya dengan baik. Harapannya, setelah memiliki ilmunya, ibu dapat menyiapkan makanan yang tepat, baik saat dalam kandungan maupun hingga usia anak terus bertambah.

Lebih jauh, dengan berbagai pendekatan tersebut, stunting diharapkan dapat teratasi serta anak lebih cerdas dan lebih baik kesehatannya. Jika anak bisa berkembang dengan baik dan perempuan bisa lebih mandiri, maka mereka bisa menghadapi permasalahannya serta dapat hidup layak dan sejahtera. Terkait dengan penanganan kenakalan remaja dan korban KDRT, Banjarharjo juga belajar bersama Kalyanamitra dan sudah melakukan audiensi dengan pihak P2TP2A dengan harapan apabila terdapat kasus yang berkaitan maka bisa bekerjasama dengan pihak



Gambar 10. Kegiatan perempuan di Kelurahan Banjarharjo

P2TP2A untuk penanganannya, begitu juga dengan balai rehabilitasi, apabila terdapat kasus yang berkaitan, mereka juga bisa merujuknya kesana.

Banyak faktor yang mendorong keberhasilan Banjarharjo menjadi DRPPA. Salah satunya adalah keterlibatan aktif perempuan dalam pembangunan desa. Dari 122 orang kader kesehatan, mayoritas (121 orang) adalah perempuan. Setiap pengambilan keputusan di tingkat desa, seperti Musyawarah Kelurahan, kader pasti diundang dan datang. Begitu juga dalam unsur pendidikan, seperti HIMPAUDI yang kesemuanya perempuan juga turut diundang dan hadir. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam forum pengambilan keputusan yang strategis ini sangat tinggi. Pemerintah, khususnya bidang kemasyarakatan, sudah banyak mendorong perempuan untuk mengadakan kegiatan dan pemberdayaan agar lebih maju lagi. Misalnya

terkait Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju dan Mandiri), yang semua anggotanya juga perempuan. Banyak kegiatan yang dikembangkan di Desa Prima itu sendiri.

Meskipun dari sisi partisipasi sudah cukup bagus, juga kegiatan di bidang kesehatan dan pendidikan sudah bagus, tantangannya adalah agar peran perempuan lebih terlihat dan semakin berani menyampaikan pendapatnya. Hal ini membutuhkan proses yang panjang. Misalnya pada saat rapat hadir, banyak perempuan yang hadir akan tetapi masih banyak yang diam. Dalam forum perencanaan pembangunan, seperti Musyawarah Kelurahan, kehadiran perempuan memang belum 30%, yaitu baru sekitar 17 orang yang berasal dari kader dan kelembagaan perempuan, dan itu baru mencapai 21% sehingga belum memenuhi syarat 30% keterwakilan perempuan. Hal ini bisa jadi mendorong rasa kurang percaya diri dan minder.



Gambar 11. Suasana pelatihan untuk perempuan di Kelurahan Banjarharjo

Perjalanan DRPPA ini memang masih belum bisa dikatakan mulus, masih ada beberapa kendala. Untuk mewujudkan DRPPA Banjarharjo yang berkelanjutan, masih harus lebih banyak lagi memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak. Karena pengetahuan masyarakat terkait hal tersebut perlu terus menerus dipupuk. Kelurahan Banjarharjo pun sempat merencanakan kegiatan pelatihan *parenting* dengan jumlah peserta 70 orang dalam 2 sesi. Adapun materi yang disampaikan adalah terkait hak-hak anak dan perempuan dengan narasumber yang berkompeten. Akan tetapi, rencana tersebut

belum bisa terealisasi karena dana terserap untuk penanganan COVID-19. Selain itu, dari 372 balita di desa Banjarharjo, hanya sekitar 30 % yang terlibat aktif di 10 PAUD yang tersebar di Banjarharjo. Menurut pengelola PAUD, ada beberapa alasan masih rendahnya partisipasi tersebut, utamanya adalah karena tidak ada yang mengantar. Tidak semua orang tua mau atau bisa mengantar dan menunggu anaknya sekolah. Selain itu, belum semua orang tua memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan anak usia dini. Ini merupakan pekerjaan rumah yang harus dituntaskan Banjarharjo untuk mencapai tujuan SDGs 5.

Perlindungan Perempuan Pekerja Migran

In labor-abundant countries, migrant workers are considered state assets and the government often calls them the 'economic heroes' of the nation. Yet by maximizing economic benefits, the protection of labor migrants is often neglected by both origin and host countries [23]

Tak hanya perempuan dan anak korban KDRT atau kejahatan seksual yang membutuhkan perlindungan, perempuan Pekerja Migran juga menjadi salah satu kelompok rentan yang dapat menerima diskriminasi hingga kekerasan. Kepedulian terhadap kelompok ini, salah satunya ditunjukkan dengan praktik baik yang dilakukan di desa Babakan Gebang, Kecamatan Babakan, Cirebon, Jawa Barat¹⁹. Salah seorang Purna PMI di Babakan Gebang menuturkan, bahwa ibu Kades Babakan Gebang telah mencoba menerapkan kepemimpinan desa dengan perspektif kesetaraan gender.

Salah satu prakteknya baiknya adalah ketika menangani dan memperjuangkan kasus PMI bermasalah bernama Anita, PMI di Erbil Irak. Dalam proses pemulangan PMI tersebut, ibu

kades sempat menghadapi tantangan dan bahkan ancaman. Namun dengan kegigihan ibu kades, akhirnya PMI tersebut bisa dipulangkan lebih cepat. Babakan Gebang sendiri sebenarnya bukan daerah kantong Pekerja Migran Indonesia, akan tetapi, selama masa pandemi Covid-19 banyak warga desa yang berangkat ke luar negeri tanpa memiliki dokumen resmi.

"Itu awal tahun 2021. Ada warga saya berangkat ke Erbil Irak (dan) bermasalah, disana dapat penyiksaan dan dia juga merasa ingin pulang aja mungkin karena tertekan. Saya bagaimana caranya untuk warga saya bisa pulang. Ya saya berperan aktif ke dinas sampai kementerian luar negeri ya. Saya mencari telepon KBRI Irak, Alhamdulillah dengan persuasif dan kegigihan dalam jangka waktu dua bulan, warga Babakan itu bisa pulang dengan selamat dan aman," (Yeni Setiati, Kepala Desa Babakan Gebang)

Atas kejadian dan pengalaman tersebut, Kepala Desa langsung membuat SK Pembentukan Tim Satuan Tugas (Satgas) Pelindungan PMI. Satgas ini turun langsung ke lapangan untuk penanganan kasus dan pendataan warga yang menjadi PMI. Guna memperkuat kedudukan Tim Satgas tersebut, disusun Peraturan Desa (Perdes) untuk mendukung setiap kegiatan sosialisasi dan operasional lainnya melalui penganggaran. Ibu Kades pun kemudian mendapatkan apresiasi dan memperoleh penghargaan dari Kemenlu RI dan Kementerian Tenaga Kerja RI²⁰. Meskipun dengan keterbatasan anggaran, Ibu Kades Babakan Gebang juga dianggap turut memperjuangkan agar Satgas PMI desa Babakan Gebang mendapatkan anggaran yang cukup untuk pembiayaan kegiatan Pendataan PMI Babakan Gebang.

¹⁹ Desa yang kini menjadi ibu kota Kecamatan Babakan ini semula merupakan suatu pedukuhan yang dibangun pada masa penjajahan Belanda. Kata "Babakan" dan "Gebang" mengandung pengertian bahwa pada awal pendiriannya Dukuh Babakan dibangun di bawah kekuasaan Gebang. Saat itu Gebang merupakan daerah berdikari (berdiri sendiri) dari Kesultanan Cirebon yang dipimpin oleh Pangeran Sutajaya atau disebut Ki Gede Gebang. Berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber oleh tim ahli sejarah dan kearsipan dari Keraton Kacirebonan, Pemerintah Desa Babakan Gebang, Desa Babakan Gebang ditetapkan lahir pada 15 Februari 1815.

²⁰ <https://rri.co.id/cirebon/ciayumajakuning/kab-cirebon/1299156/desa-babakan-gebang-raih-dua-penghargaan>



Gambar 12. FGD pengalihan data di Babakan Gebang

Ketua BPD Babakan Gebang menjelaskan bahwa Anggaran Desa untuk kegiatan terkait Pembinaan lembaga desa dan Pemberdayaan Masyarakat perempuan dan anak yang disetujui oleh BPD telah mencapai kisaran 30% atau sesuai dengan ajuan dari Kades. Namun demikian, secara kuantitas, keterlibatan perempuan dalam musyawarah dan pengambilan keputusan desa diakui masih cukup rendah. Terkait program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), saat ini masih dalam tahap proses. Tahapan yang sudah dilalui adalah proses verifikasi dari Tim Verifikasi DP2KBP3A Kab. Cirebon dan Provinsi. Selama masa Pandemi COVID-19, proses-proses tersebut menjadi agak terhambat. Saat ini, pencaangan pilot program RPPA kabupaten Cirebon baru terdapat di 2 (dua) desa yaitu Desa Purbawinangan Kec. Plumbon dan Desa Babakan Kec. Babakan. Kades Babakan Gebang pun telah meminta bantuan dan dukungan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan semua pihak atas pencaangan program Desa RPPA di Babakan Gebang.

Tak hanya terbatas pada perlindungan pekerja purna migran atau pencaangan RPPA, Desa Babakan Gebang juga terus berupaya untuk mendampingi dan memenuhi kebutuhan kelompok rentan di wilayahnya. Pemdes sering mengadakan kontrol kesehatan dan pengobatan gratis untuk para Lansia melalui Polindes Babakan Gebang. Mereka juga secara berkala mengadakan donor darah. Pemdes juga berupaya mencari cara agar para penyandang disabilitas mendapatkan bantuan, baik melalui proposal kepada Pemerintah maupun dari anggaran Dinas. Desa Babakan gebang memiliki sejumlah kelompok/perkumpulan *Jami'ahan minggon* (Pengajian rutin) sebagai merupakan model pendekatan kerohanian para perempuan dan Lansia. Memang tidak mudah menjaga komitmen seperti di atas. Pencapaian tujuan SDGs Desa tidaklah melulu seindah dan semudah yang tertulis. Banyak batu terjal yang dihadapi oleh Pemdes, baik secara individu maupun organisasi dan kelembagaan dalam mewujudkan berbagai tujuan mulia tersebut.

Oleh karena itu, sekecil apa pun upaya yang dilakukan, harus mendapatkan apresiasi sebagai bagian dari upaya kolektif mencapai tujuan-tujuan SDGs Desa di Indonesia.

Selain di Desa Babakan Gebang, Desa Pugung Raharjo yang berlokasi di Kecamatan Sekampung Udik, Provinsi Lampung, juga memiliki komitmen dalam upaya perlindungan perempuan PMI di desanya. Desa Pugung Raharjo sendiri memiliki 7.149 warga yang mendiami desa tersebut, dengan persebaran 3.585 laki-laki dan 3.564 perempuan. Pugung Raharjo merupakan desa yang memiliki fasilitas perdagangan yang lengkap, sehingga menjadi pusat dan salah satu daerah yang memiliki potensi ekonomi terbesar di Kecamatan Sekampung Udik karena memiliki pasar, pertokoan, mini market, restoran, dan lain sebagainya.²¹

Desa Pugung Raharjo biasa dikenal dengan kampung yang memiliki pariwisata Purbakala. Terdapat taman berundak seperti piramid di daerah tersebut. Peneliti menilai bebatuan dan peninggalan tersebut sudah dikenal sejak 2500 SM, ketika zaman Hindu-Budha sampai Islam. Tak hanya prasasti dan bebatuan, terdapat juga gapura sebesar 1,2 KM yang dulu digunakan untuk jalan, irigasi air, yang dulu sering digunakan oleh orang di zaman dahulu untuk bertahan hidup²².

Adanya permasalahan buruh migran diawali dari pengalaman warga ada yang ingin bekerja ke luar negeri dan meminta tanda tangan Kades. Namun karena tidak didampingi sponsor, Kades tidak bersedia untuk memberikan ijin. Tak

Raharjo Lampung, Kumparan. <https://kumparan.com/angga-jati-widiatama/wisata-langit-purbakala-di-pugung-raharjo-lampung-1ua2a8GbdY/full>. Diakses 12 Juni, 2022.

21 Badan Pusat Statistik. 2019. Kecamatan Sekampung Udik dalam Angka 2019. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Timur.

22 Angga Jati Widiatama. 2020. Wisata Langit Purbakala di Pugung

berselang lama, warga tersebut diketahui sudah bisa berangkat tanpa adanya tanda tangan kepala desa tersebut. Tentu saja pengalaman ini membuat pemerintah desa terheran-heran.

Pengalaman ini menunjukkan bahwa warga akan melakukan apa saja (nekad) untuk dapat bekerja ke luar negeri, baik secara legal maupun ilegal. Berangkat dari fakta ini, Pemdes Pugung Raharjo pun berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan migrasi aman dengan terus mensosialisasikan kepada masyarakat di desa. Banyaknya permasalahan ketimpangan gender dan masalah pekerja migran perempuan ini karena jumlahnya yang cukup besar di desa Pugung Raharjo. Pemdes pun akhirnya membentuk SATGAS dengan semangat untuk melindungi perempuan PMI.

Satgas ini diberi tugas untuk melindungi dan mendampingi PMI ketika akan berangkat bekerja sampai pulang ke rumah. Mereka harus memastikan PMI tersebut dapat menikmati jerih payahnya dan mendapat keamanan finansial maupun rumah tangga yang harmonis untuk hidup yang layak. Menurut Pemdes, masih banyak warga yang membutuhkan bimbingan maupun pendamping lapangan agar lebih baik lagi dalam mengambil keputusan.

“Desa mendukung adanya SATGAS desa untuk perlindungan perempuan pekerja migran dan adanya dukungan insentif untuk anggotanya. SATGAS ini sudah banyak berperan dalam mencegah TPPO dan

*mensosialisasikan migrasi aman yang
ada di desa Pugung Raharjo”
(Kades Pugung Raharjo)*

Selain upaya serius untuk melindungi PMI, Pemdes juga mengeluarkan berbagai kebijakan responsif gender, yaitu dengan melibatkan perempuan di pemerintahan desa seperti menjadi Perangkat, Lembaga Masyarakat, Ketertiban Lingkungan, BPD, serta pengangkatan kader desa dengan memprioritaskan perempuan untuk ikut membantu jalannya pemerintahan desa. Terkait anggaran dana desa, Pemdes juga berupaya untuk berperan dengan memberikan ruang kepada perempuan untuk terlibat pada kegiatan di tingkat desa. Keterwakilan perempuan yang ada di desa saat ini sudah dianggap cukup mewakili perempuan. Sebagian dana desa juga sudah diarahkan untuk mendukung keterlibatan perempuan.

Keterwakilan perempuan dalam musrembangdes dan rapat-rapat juga terlihat meningkat. Mereka berani bersuara untuk mengusulkan pembelian alat-alat kesehatan, alat-alat posyandu, hingga adanya kader kesehatan yang 90 persen perempuan. Pemberian makanan tambahan untuk anak dan Ibu Hamil serta adanya rapat koordinasi semua kader perempuan di desa untuk refleksi atau rembuk terkait dengan masalah perempuan dan kesehatan di desa juga merupakan inisiatif perempuan. Tentu saja masalah dan tantangan utamanya adalah masih banyaknya Rumah Tangga Miskin yang menyebabkan mereka tidak mampu mengikuti pendidikan yang cukup, serta tidak dapat mengikuti arus perkembangan pengetahuan.

Kemiskinan mendorong perempuan harus ikut bekerja sangat keras hingga ke luar negeri menjadi pekerja migran, sementara suaminya ditinggal mengurus anak. Banyak lahir kasus perceraian akibat pola seperti ini. Masalah utama lainnya adalah anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya yang bekerja ke luar negeri dan diasuh oleh kakek-neneknya. Situasi ini menjadi bahan olok-olokan oleh temannya di sekolah, sehingga menjadi beban mental dan psikis dari anak PMI tersebut.

“Permasalahan yang paling utama yang kita lihat itu adalah ekonomi.

Yang paling rentan adalah yang berada di tengah-tengah. Ketika yang berada ditengah ini miskin, tetapi masih mempunyai tabungan untuk berangkat ke luar negeri, akhirnya tabungan itu dibuat untuk berangkat ke luar negeri untuk memperbaiki ekonomi keluarga”.

KDRT juga berawal dari hal tersebut. Bisa jadi sebelum berangkat ke luar negeri juga ada KDRT yang dialami oleh perempuan. Menurut penuturan informan, inti dari masalah adalah status ekonomi yang menjadi penyebab masalah tersebut. Untuk perkawinan anak yang terjadi di desa Pugung Raharjo ini masih dapat ditekan, kemungkinan hanya 1 kasus bahkan pada tahun ini tidak ada kasus perkawinan anak yang terjadi.

Desa tentu berperan mendampingi dalam hal perkawinan anak sampai saatnya umur sudah



Gambar 13. Diskusi di Desa Pogung Raharjo

siap dan bisa mendapatkan catatan dan buku nikah. Namun demikian, untuk kekerasan anak, dalam beberapa tahun terakhir ini tercatat ada 2 kasus yang dialami oleh anak-anak. Upaya pemerintah desa untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan berupaya memasukan rumah tangga miskin ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selain itu, dari total DD yang diterima sudah digunakan dan disalurkan untuk membantu 111 KK kurang mampu guna mengatasi gejala ekonomi di lingkungan masyarakat Pugung Raharjo, meskipun hal itu tidak serta merta mampu mencukupi semua kebutuhannya. Disinilah peran Satgas, tokoh agama, dan tokoh masyarakat lainnya menjadi penting, Tidak hanya mendampingi PMI agar berangkat sesuai dengan prosedur resmi, tetapi juga memastikan bahwa anggota keluarganya yang ditinggal, terutama anak-anak, mendapatkan kasih sayang dan dapat bertumbuh kembang dengan baik.

Menjaga dan Menumbuhkan Toleransi Dari Desa

“...and we lack understanding of why incidents of religious intolerance continues to increase, not just in Indonesia, but also in other Muslim-majority countries elsewhere. We also need to understand better what are the political and socio-cultural mechanisms (both at the macro and micro-level) that lead to the occurrence of religious intolerance within a given community” [24]

Merawat Kerukunan Melalui “Desa Pancasila”

Sudah bukan rahasia jika kehidupan keragaman dan keberagaman di Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Banyak konflik yang mencuat akibat adanya sentimen identitas atau gesekan antar agama, baik yang bersifat laten hingga yang tercatat dalam sejarah dengan berdarah-darah seperti konflik Ambon dan Poso^[25]. Keberagaman dalam beragama di Indonesia merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, setiap umat beragama wajib untuk mengakui sekaligus menghormati agama lain tanpa membeda-bedakan. Inilah yang disebut sebagai sikap toleran. Sikap toleransi tentu tidak memiliki batas waktu, tempat dan dengan siapa kita melakukannya.

Sikap toleransi tidak hanya dilakukam untuk menghargai ras, agama, budaya, suku dan golongan orang lain saja, tetapi dalam konteks paling kecil, menghargai pendapat orang lain jugamerupakanbentukdaritoleransi. Pentingnya pemahaman dan penerapan toleransi dalam kehidupan perlu disikapi dengan serius. Tak hanya di perkotaan yang sering terpapar berita palsu (*hoax*) yang menyulut kebencian dan intoleransi, warga di pedesaan juga perlu terus memupuk sikap toleran ini. Seperti yang ditunjukkan dan dicontohkan dengan baik oleh warga Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur, Provinsi Lampung.

Dengan jumlah penduduk sekitar 13.975 jiwa (7.159 laki-laki dan 6.816 perempuan), persebaran tempat ibadah di Desa Sidorejo cukup beragam, diantaranya terdapat 9 masjid, 36 mushola, 2 gereja, 3 pura, dan 1 vihara. Hal tersebut memberikan gambaran keberagaman penduduk di wilayah tersebut²³. Mata

pencarian utama di wilayah ini merupakan sektor agrikultur, terdapat 65 kelompok tani di wilayah ini. Luas wilayah pertanian (sawah) sebesar 957 ha, pertanian (non-sawah) sebesar 362 ha, dan non-pertanian sebesar 110 ha. Pertanian juga didorong dengan produksi hewani seperti: 957 ayam pedaging, 88 bebek, 364 sapi potong, 488 kambing, dan 693 babi²⁴.

Terkait dengan kerukunan umat beragama di Desa Sidorejo, Pak Made, salah seorang tokoh agama hindu desa Sidorejo menuturkan bahwa awalnya ketika warga Hindu mengadakan kegiatan hari raya Nyepi dan membuat *ogoh-ogoh*, banyak warga lain lintas agama yang datang membantu. Dari situlah awalnya hingga saat ini semakin terjalin kerjasama dan toleransi. Sebaliknya, ketika umat muslim melaksanakan tarawih di bulan Ramadhan, sahabat pecalang di Desa Sidorejo ikut dalam pengamanan masjid-masjid.

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh Nengah Pasek, perwakilan dari lembaga adat, bahwa warga Sidorejo sering bercampur dengan tokoh dan rekan rekan agama lain lintas agama, hingga akhirnya mereka menggagas sebuah Forum Kerukunan Bersama antar umat beragama untuk menciptakan dan menjaga kerukunan tersebut. Hal seperti ini tentu saja sangat sesuai dengan visi Desa Berjejaring dan Desa Tanggap Budaya yang menjadi bagian dari tujuan dan tipe SDGs Desa.

23 Badan Pusat Statistik. 2019. Kecamatan Sekampung Udik dalam Angka 2019. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Timur.

24 Badan Pusat Statistik. 2019. Kecamatan Sekampung Udik dalam Angka 2019. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Timur.

Hal menarik lainnya diungkapkan oleh Sekdes Sidorejo

“(Toleransi itu) diawali (dari) para tokoh agama, sinerginya penting, karena masyarakat ini kan biasanya melihat yang di atas. Kalau yang di atas mesra, rukun, yang di bawah ini kan mencontoh”

Toleransi, dalam kasus Desa Sidorejo, bisa terwujud dengan kebersamaan dan saling pengertian antar umat beragama di dalamnya yang dicontohkan oleh para pemimpin/pemuka agamanya. Pekerjaan rumahnya saat ini adalah justru bagaimana mewariskan kerukunan dan sikap toleransi yang sudah tumbuh ini kepada anak-anak atau generasi selanjutnya? Kesadaran untuk membangun tanpa melihat perbedaan agama dan keyakinan merupakan rumus kerukunan yang dipegang erat oleh segenap warga Sidorejo. Menurut salah satu pengelola Bumdes, menyandingkan umat antar agama di satu tempat, dalam suasana peribadatan, lalu kita ikrarkan dan kita ekspos, itu bisa menjadi indikator dalam pencapaian kerukunan umat beragama.

Selain mendorong soal toleransi, Pemerintah desa Sidorejo juga secara aktif juga ikut melibatkan partisipasi masyarakat, khususnya perempuan dan anak, dalam pembangunan dan kegiatan-kegiatan di tingkat desa.

“Bagi kami, roh-nya kegiatan itu ada di perempuan, permasalahannya ruang

untuk ibu-ibu masih kurang, forum lintas agama juga perlu digalakkan, secara umum permasalahan horizontal dalam keberagaman beragama sudah terbentuk kelompok kelompok agama terutama digagas oleh pemuda untuk membantu pembangunan desa”. (Nengah Pasek, Lembaga Adat)

Sekdes Sidorejo menuturkan bahwa skala prioritas Desa saat ini adalah untuk membantu lansia, perempuan, rumah tangga miskin, serta setiap pembangunan yang bersumber dari Dana Desa. Setiap ada program atau kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan, Pemdes berupaya untuk melibatkan perempuan (kecuali penjaga makam). Beberapa program inovasi desa dan PKK, misal rembuk stunting, semuanya melibatkan perempuan. Di Desa Sidorejo, ketua RT ada dua orang yang perempuan, Kepala Dusun juga ada 2 orang perempuan, BPD dan lain lain juga sudah melibatkan perempuan. Dalam setiap kegiatan Pemdes juga telah melibatkan perempuan terutama dalam pengambilan keputusan, misal dalam Musrenbangdes dan PAUD. Hal ini pun dibenarkan oleh Karang Taruna Sidorejo; *“hampir dalam semua kegiatan desa, pelibatan perempuan sudah sangat tinggi bahkan dalam kegiatan hampir semua pasti perempuan yang banyak membantu bekerja bahkan menginisiasi”.*

Meskipun demikian, perjalanan untuk menjaga toleransi antar umat beragama di Desa Sidorejo, bukanlah perjalanan yang tanpa tantangan.

Secara internal, kemiskinan dan pengangguran masih menjadi masalah yang menghantui. Seperti diungkapkan oleh salah satu anggota Karang Taruan Desa Sidorejo; *“yang saya amati semua permasalahan kita selama ini ada satu yang sederhana, tapi penting, yaitu menyediakan lapangan kerja bagi kelompok rentan, terutama perempuan, disabilitas atau usaha padat karya, agar semua dapat berdaya”*. Persoalan pemenuhan kebutuhan dasar ini sangat penting dan utama mengingat akar dari konflik biasanya adalah kecemburuan sosial. Sedangkan penyebab kecemburuan sosial yang paling sering terjadi adalah ketimpangan atau kecemburuan ekonomi. Kecemburuan ekonomi yang dibalut oleh isu identitas dan keagamaan tertentu, akan menjadi sumber konflik yang sangat cepat meluas. Oleh karena itu, satu paket yang harus dituntaskan untuk menjaga kedamaian dan kerukunan adalah menciptakan peluang ekonomi yang sama bagi semuanya.

Ni Komang Bayu Ningsih, salah satu anggota PKK Sidorejo, mengungkapkan kerentanan terjadinya kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua. Khususnya ketika orang tua diminta untuk mendampingi anaknya belajar di rumah – selama pandemi COVID-19. Karena mengajar anak itu susah, maka seringkali terjadi kekerasan yang tidak diperlukan. Oleh karena itu, menurutnya penting bagi para orang tua untuk memiliki *mindset parenting* atau pengasuhan yang tepat. Seringkali ucapan atau tindakan orang tua itu menciderai psikis dan bahkan fisik anak. Pola pendidikan yang “keras” seperti ini, dapat mengendap dalam pengalaman kognitif anak-anak dan kelak ketika dewasa juga dapat berpotensi melakukan kekerasan atau tindakan-tindakan intoleransi.

Dari sisi komunitas, masalah utama yang dihadapi perempuan di desa Sidorejo saat ini adalah masih kurangnya kepercayaan sebagian warga terhadap kemampuan perempuan. Masih banyak warga masyarakat yang membedakan antara laki laki dan perempuan (diskriminasi), seolah olah tidak percaya kalau perempuan itu mampu, mampu memimpin, mampu mengatasi masalah dan lain sebagainya. Ini salah satu masalah perempuan yang penting diintegrasikan dalam pengembangan desa yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, yang tentu saja di dalamnya adalah anti diskriminasi. Tidak hanya diskriminasi dan intoleransi kepada pemeluk agama lain, tetapi juga diskriminasi terhadap perempuan perlu dihilangkan.

Pemerintah desa diharapkan dapat terus terlibat aktif dalam melibatkan komponen-komponen kerukunan ini. Pemdes harus memiliki program kerja yang fokus dalam merawat desa Pancasila. Perlu dibentuk dan dirawat forum keberagaman dan toleransi ini dengan tetap memberikan ruang kebebasan untuk berekspresi sesuai dengan identitas suku maupun keagamaannya. Konsistensi dalam menjaga keberagaman dan kekhasan desa ini harus lebih ditingkatkan. Kegiatan yang melibatkan anak-anak juga perlu disisipkan pemahaman tentang toleransi supaya anak-anak mengenal keberagaman. Bentuk dukungan pemangku kepentingan lainnya ditingkat desa, kabupaten, hingga pusat juga perlu terus digalakkan dalam dalam memajukan SDGs Desa Sidorejo ini, mulai dari perencanaan dan juga evaluasi.

Mendorong Kesetaraan Gender Dari Desa

Desa Batutulis berada di wilayah kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Nama Desa ini diambil dari Prasasti Batu Tulis yang terletak di Dusun Jerneng yang berada di pinggir sungai. Batu yang bertuliskan Lingkaran di tengahnya ini dipercaya masyarakat sekitar di ukir dengan tangan oleh Raden Kasih, salah seorang raden yang makamnya terletak di Pekuburan umum Desa Batu Tulis. Desa ini sebagian besar penduduknya bersuku Sasak²⁵. Desa ini merupakan hasil pemekaran dari desa induknya pada tahun 1968. Kini desa Batutulis memiliki lima dusun: Batutulis, Jereneng, Bangket Gawah, Gontoran, dan Bunje. Jumlah penduduk desa Batu Tulis sebanyak 4.070 jiwa, dengan laki-laki sebanyak 2.023 orang dan perempuan sebanyak 2.047 orang²⁶.

Luas wilayah desa Batu Tulis seluas 311 Ha/28,28 km, terdiri dari areal persawahan seluas 119 Ha, pemukiman seluas 101 Ha, pekuburan seluas 3,5 Ha, perkantoran seluas 3,6 Ha, serta sarana dan prasarana umum lainnya seluas 48,32 Ha²⁷. Desa Batutulis merupakan daerah dataran rendah dengan corak perekonomian agraris, dengan total penggunaan lahan pertanian mencapai 66,69% dari total penggunaan lahan desa. Sekitar 78,10% penduduk memiliki mata pencaharian pada sektor pertanian. Selain sektor pertanian, beberapa potensi dan aktivitas ekonomi yang ada di desa Batu Tulis antara lain pengolahan kripik pisang dan singkong, pembuatan krupuk kulit, pembuatan batako, bata merah, anyaman bambu, tikar, penenun, dan penjahit.

25 http://kk.sttbandung.ac.id/id3/2-3060-2940/Batutulis_165127_ensiklopedia-bebas-q-sttbandung.html

26 RPJMDes Desa Batu Tulis tahun 2019-2024

27 RKPDes Desa Batutulis tahun 2022

Kelembagaan yang dimiliki oleh pemerintahan desa Batu Tulis saat ini antara lain BPD, LPM, PKK, BKD, BUMDes, Lembaga Adat, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Terpadu (LEMPERMADU). Selain itu ada juga posyandu, sanggar kesenian, kelompok Ale-Ale dan gamelan, karang taruna, kelompok pemuda, kelompok perempuan dan kelompok Wanita tani. Pemdes Batu Tulis berkomitmen untuk benar – benar mendorong kesetaraan gender di wilayahnya. Pemdes mendukung pembentukan paralegal untuk membantu dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan termasuk di dalamnya adalah masalah pernikahan anak yang cukup tinggi. Pelatihan-pelatihan banyak dilakukan untuk membekali paralegal. Sebagai salah satu kantong PMI, perempuan desa Batu Tulis memilih menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Ada juga alasan non ekonomi (alasan keluarga) sehingga memilih menjadi PMI.

Desa Batu Tulis memiliki Posyandu Keluarga yang terintegrasi dimana semua lapisan masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan tersebut, termasuk balita dan Lansia. Sayangnya, para penyandang disabilitas masih belum terdata dan terorganisir dengan baik dikarenakan masih banyak keluarga yang belum terbuka jika ada penyandang disabilitas di dalam keluarganya. Pernah terjadi, tiba-tiba ada salah satu warga desa yang meninggal dan baru diketahui ternyata di rumah tersebut ada penyandang disabilitas. Dengan kata lain, disabilitas masih dianggap aib bagi keluarganya. Melihat fakta dan kecenderungan seperti itu, setiap ada program santunan dari Pemdes, maka kelompok disabilitas diberikan porsi khusus sehingga keluarga disabilitas bisa mendapat santunan, termasuk BLT DD. Pada Program Sanitasi Pemdes Batu Tulis juga mengutamakan keluarga yang memiliki disabilitas.

“Kami ingin agar jika ada anggota keluarga yang disabilitas diijinkan untuk bersosialisasi. Untuk itu kami membutuhkan ada semacam konseling kepada keluarga dimana terdapat disabilitas didalamnya, agar mereka tidak mengekang anggota keluarganya yang disabilitas” (Kades Batu Tulis)

Meski dengan keterbatasan dana dan anggaran Desa, Pemdes menyiasatinya dengan berkolaborasi bersama lembaga lain seperti Rumah Zakat untuk membina KWT dan kelompok perempuan. Dana Desa umumnya dikelola untuk semua dusun dan untuk kebutuhan fisik terlebih dahulu, kemudian sisanya baru bisa digunakan untuk kegiatan pemberdayaan. Di desa Batu Tulis saat ini ada 1 KWT dan 1 kelompok perempuan yang aktif. Dua dusun yang dijadikan pilot kegiatan adalah dusun Bunje dan Bangket Gawah. Sementara itu, untuk PAUD yang ada di desa saat ini masih dikelola oleh Yayasan sehingga Pemdes hanya bisa memberikan bantuan makanan tambahan untuk peserta didik dan alat – alat tulis atau bermain.

Satu hal menarik dari Desa Batu Tulis adalah des aini pernah menggelar musrenbang khusus perempuan pada tahun 2020. Pada saat itu, diusulkan tentang pemberdayaan kelompok perempuan, paralegal, hingga usulan untuk pemberdayaan pedagang *bakulan*. Bahkan untuk pemberdayaan pedagang bakulan ini sudah terealisasi dengan masing-masing mendapatkan Rp. 600 ribu. Jika dihitung

dan dikumpulkan, bantuan-bantuan untuk masyarakat atau kelompok perempuan di Desa Batu Tulis dalam satu bulan bisa mencapai Rp 2.500.000 per orang.

Upaya mendorong keterlibatan perempuan dan kesetaraan gender tak hanya berhenti disitu. Pada acara musyawarah dusun (Musdus) dan musyawarah desa (Musdes), perempuan juga dilibatkan secara aktif. Dalam kegiatan Musdus, sekitar 10 orang perempuan hadir, sedangkan dalam kegiatan Musrenbangdes ada perwakilan dari masing – masing dusun sebanyak 2 atau 3 orang perempuan. Usulan dari kelompok-kelompok perempuan ini pun bisa melalui jalur PKK, misalnya dalam hal pembagian BLT, pelatihan, kenaikan insentif untuk kader, dan lain-lain. Salah satu usulan yang sudah terealisasi adalah insentif kader sudah berhasil dinaikkan, kelompok ekonomi juga sudah mendapat perhatian berupa penerbitan SK oleh Desa dan Bumdes juga mendukung untuk mempromosikan produk-produk buatan kelompok perempuan ini (etalase dan display).

Posyandu di desa Batu Tulis terhitung sangat aktif. Misalnya, jika ada kasus warga perempuan yang bermasalah dengan kandungannya, maka ia akan mendapatkan pendampingan sampai tuntas. Jika ada warga yang melahirkan, Pemdes memberikan fasilitas antar jemput, dan apabila tidak terdaftar di BPJS Kesehatan, pemerintah desa memfasilitasi untuk mendapatkan bantuan BPJS Kesehatan dalam keadaan darurat (untuk melahirkan/jampersal). Ketika kegiatan PKK dan arisan desa vakum selama pandemi COVID-19, kegiatan posyandu kesehatan masih terus berjalan dan bertahan oleh kegigihan kader-kadernya.

“Pengetahuan kami dari blank menjadi melek dan kami mengerti sekarang tentang gender. Dimana gender artinya kesetaraan antara hak laki – laki dan perempuan dan pengetahuan ini sangat bermanfaat di pemerintah desa. Dalam kehidupan di masyarakat, semenjak ada binaan dari ADARA ada perubahan pola pikir dan prilaku misalnya jika awalnya hanya diam saja sekarang sudah mandiri dan percaya diri bahkan prilaku ini ditiru oleh warga lainnya. Ini merupakan keberhasilan dari ADARA” (Kepala Desa Batu Tulis).

Ibu Kom dan Ibu Nur, salah seorang warga perempuan Batu Tulis mengungkapkan bahwa sekarang mereka sudah bisa mengakses berbagai hal di lingkup pemerintahan. Bisa mengenal hukum dan bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Secara ekonomi perempuan-perempuan ini juga mengaku bisa berkembang terutama dalam hal mengatur keuangan, bisa membantu sesama dan juga lebih berani menghadapi berbagai permasalahan.

“Setelah banyak pelatihan, di kelompok kami bisa menghasilkan uang, hanya kemarin dapat macet dan sekarang sudah berjalan lagi. Apalagi menjelang lebaran ini hampir setiap hari membuat produk. Anggota yang dulunya tidak berani bicara tapi sekarang setiap ada tamu sudah

berani untuk bicara. Kelompok sangat berterima kasih setinggi – tingginya terhadap ADARA. Koperasi kita juga sudah berkembang dan anggota kelompok juga sudah semakin berkembang” (Ibu Nur, warag Batu Tulis)

Peran Pemdes juga dinilai oleh warga sangat positif. Pemdes dianggap memberikan perhatian terhadap masyarakat dan cepat memberikan respon jika ada permasalahan. Contohnya ketika kasus pernikahan anak banyak terjadi di masyarakat, warga mengusulkan ke Pemdes agar dibuat aturan tentang pernikahan anak dan akhirnya lahirlah Perdes anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Respon cepat seperti ini sangat diapresiasi oleh warga desa Batu Tulis. Beberapa perempuan yang terlibat aktif dalam kegiatan desa juga mulai berkembang dan memiliki semangat untuk berubah. Para pelaku usaha perempuan di desa ini juga mulai melihat internet sebagai peluang dalam pemasaran produk-produk mereka. Dengan kata lain, pola pikir perempuan perlahan mulai berubah dan semakin terbuka dalam memanfaatkan teknologi dan sosial media.

Meskipun demikian, sebagian perempuan lainnya masih perlu mendapatkan dorongan dan pendampingan yang lebih baik. Sebagian belum berani untuk mengambil inisiatif atau memulai usaha dengan alasan tidak ada modal. Meskipun ada juga yang semangat untuk mengembangkan diri dengan menggunakan modal pribadi. Pihak Pemdes berargumen bahwa anggaran sudah disiapkan, namun masalahnya perempuan sendiri yang enggan mengakses atau mengembangkan dirinya. Misalnya, pelatihan menyulam dan membuat tas dari tali kur sudah dilakukan, akan tetapi

tidak ada tindak lanjutnya. Pernah juga ada pelatihan menjahit, namun setelah itu mesin jahit tidak digunakan sehingga mesinnya menjadi berkarat.

Kendalainnya adalah masih banyak perempuan yang enggan meminjam di koperasi kelompok perempuan dan lebih memilih meminjam di bank keliling dengan pola mencicil/membayar harian. Selain itu, perempuan rentan dan penyandang disabilitas juga belum terorganisir dengan baik. Datanya pun belum lengkap. Pernah terjadi kasus penyandang disabilitas di wilayah desa yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual, bahkan sampai melahirkan. Selain bantuan untuk kelompok disabilitas, bantuan untuk kelompok lansia juga masih dirasa minim.

Meski saat ini pernikahan anak sudah mulai berkurang, perempuan – perempuan di desa Batu Tulis masih dianggap belum produktif dan belum memiliki ketrampilan khusus, sehingga kebanyakan menjadi buruh tani yang bersifat musiman. Ketika tidak ada musim untuk bertani, maka jalan pintas yang dilakukan adalah menjadi PMI. Pernah juga Desa Batu Tulis mendapat program pendampingan dari pihak ketiga, seperti rumah zakat, yang memberikan pendampingan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Bentuk pembinaannya adalah dengan memanfaatkan pekarangan rumah. Ibu – ibu mendapatkan bibit dan melakukan pembenihan kemudian ditanam di pekarangan mereka yang tujuannya bisa mengurangi belanja rumah tangga. Dari Baznas juga pernah ada bantuan untuk pedagang bakulan.

Hal menarik terkait ekonomi dan perempuan di desa Batu Tulis adalah terkait peternakan domba dan unggas. Unggas, misalnya, bukan

menjadi pekerjaan utama namun hanya sebagai pekerjaan sampingan yang kebanyakan dilakukan oleh perempuan dan jarang sekali laki – laki yang ikut terlibat mengerjakannya. Ini merupakan kondisi riil di masyarakat dan sekaligus secara langsung dapat memberikan tambahan penghasilan keluarga. Sayangnya, hasil dari unggas dan kambing tersebut belum dikelola atau tercatat dengan baik. Meskipun terbukti bisa digunakan untuk menyekolahkan anak – anaknya bahkan ada yang bisa sampai membangun rumah. Sebagai simulasi, jika seseorang memelihara 4 ekor kambing saja, maka dalam jangka waktu 6 bulan, ia sudah menghasilkan Rp 10.000.00 dengan menjual kambing-kambing tersebut. Jadi unggas dan kambing ini bukan sebagai mata pencaharian utama, namun sangat bisa membantu keluarga jika sewaktu-waktu membutuhkan dana yang cepat.

Berpijak pada pengalaman tersebut, pada perencanaan RPJMdes, Pemdes Batu Tulis merencanakan anggaran lebih dari Rp. 600 juta untuk peternakan unggas dan lainnya. Sayangnya, dengan adanya pandemi COVID-19, maka semua anggaran berubah sebagai akibat intervensi pemerintah pusat terhadap Dana Desa dimana saat ini hanya 32 % yang bisa dikelola sehingga program ini menjadi kurang maksimal untuk bisa diwujudkan. Pemdes bahkan telah berusaha mengakses anggaran tambahan dari Dinas/OPD terkait, bahkan sampai DPR RI untuk mendukung program tersebut.

Menjadi “Desa unggas” merupakan salah satu visi dan misi Pemdes Batu Tulis. Diawali dengan pelatihan kewirausahaan, sehingga masyarakat memahami bahwa unggas dan kambing bisa menjadi usaha alternatif atau usaha sampingan

untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Konsepnya tetap berkelompok namun pengelolaannya secara pribadi. Jika seorang perempuan memiliki unggas petelur 200 ekor saja, maka penghasilnya bersihnya per bulan bisa mencapai Rp 3.800.000. Untuk unggas terkesan sepele, namun sangat membantu dalam ekonomi keluarga. Kesimpulannya adalah dengan program unggas ini, ia tidak hanya menjadi milik satu orang saja namun seluruh warga desa. Jika ingin modal tambahan, Bumdes akan melakukan survei dan jika dianggap layak dan akan mendapat bantuan pinjaman dari Bumdes untuk pengembangan usahanya lebih lanjut.

Terlepas dari kekurangan dan hambatan yang dihadapi, yang jelas angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam 5 tahun terakhir telah berkurang, termasuk pernikahan usia anak di desa Batu Tulis juga sudah sangat bisa ditekan. Kebijakan yang responsif gender juga telah melahirkan regulasi yang pro perempuan, seperti Perdes penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta *awiq-awiq* di masing – masing dusun. Dari sini kita belajar bahwa proses pangarusutamaan gender bukanlah sebuah proses yang sederhana dan sebentar. Perlu komitmen dan kesabaran yang cukup untuk mewujudkannya. Salah satu sektor utama yang perlu didorong untuk mendukung kesetaraan gender adalah sektor ekonomi, yakni membuat sebanyak-banyaknya perempuan mandiri secara ekonomi melalui jalur kewirausahaan seperti yang dilakukan di desa Batu Tulis. Jika ekonomi dan perempuan disentuh secara simultan, maka permasalahan-permasalahan lain seperti KDRT, pola asuh anak yang buruk, hingga persoalan stunting, kelaparan, kemiskinan dan lain-lain juga dapat turut ditangani. Bukankah seperti itu tujuan SDGs Desa ini diimplementasikan?

Pemberdayaan Perempuan dan Mimpi Desa Tanpa Kemiskinan

Achieve gender equality and empower all women and girls (SDG 5)

Desa Pringgasela Selatan adalah salah satu dari 10 desa di Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur. Desa ini adalah salah satu desa pemekaran yang berubah statusnya dari Desa Persiapan Pringgasela Selatan menjadi Desa Pringgasela Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2011 tanggal 25 November 2011. Pringgasela berasal dari kata “PRINGGA” dan “SELA”. PRINGGA artinya Prajurit dan SELA artinya BATU, sehingga Pringgasela artinya Prajurit Batu. Asal Penduduk Desa Pringgasela merupakan keturunan dari raja keluarga Selaparang. Luas wilayahnya sekitar 465 Ha dengan 7 Kewilayahan dan dihuni oleh 8268 jiwa penduduk yang terdiri dari 3 trah atau suku yang berbeda yaitu trah Pringgasela, trah Rempung atau Sumbawa, dan trah Masbagik. Bentang alam desa Pringgasela Selatan sebagian besar merupakan lahan pertanian dan perkebunan dengan pemandangan gunung Rinjani²⁸

Mayoritas masyarakat di Desa Pringgasela Selatan berprofesi sebagai pengrajin tenun menggunakan alat tradisional yang disebut “Alat Tenun Gedogan”. Tenun Gedongan merupakan warisan turun temurun yang terus dikembangkan tidak hanya sebagai warisan budaya namun juga sumber mata pencaharian. Dusun Gubuk Lauk merupakan salah satu dusun penghasil tenun terbesar di Desa Pringgasela Selatan. Salah satu komunitas tenun yang ada

28 https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/pringgasela_selatan_1

di Dusun Gubuk Lauk adalah komunitas Nina Penenun dengan jumlah anggota sebanyak 350 orang. komunitas ini dibentuk sebagai wadah bagi penenun di Desa Pringgasela Selatan untuk mencurahkan segala keluh kesah yang dialami. Kain tenun yang dihasilkan oleh komunitas ini memiliki motif yang unik dan khas. Salah satunya yaitu benang lima atau simbut abang karena memakai lima warna dalam proses pembuatannya²⁹.

Desa Pringgasela Selatan ini memiliki berbagai program yang responsif gender, seperti sekolah tenun, laki-laki baru, paralegal/satgas perlindungan perempuan dan anak, serta memiliki bale mediasi desa. Perempuan-perempuan di desa ini sudah mulai terlibat dalam musyawarah kegiatan yang ada di tingkat desa. Di sisi lain, laki-laki desa pun relatif sudah memahami hak-hak perempuan dan sudah mulai paham terhadap pembagian peran antara perempuan dan laki-laki.

Lahirnya konsep desa tenun, sebagai contoh, merupakan upaya pengelolaan pariwisata yang bertumpu pada peningkatan keterampilan perempuan. Selama ini, banyak perempuan dan ibu-ibu yang pandai menenun dan mewarisi keterampilan menenun dari orang tuanya, namun pendapatannya masih minim akibat dari pemasaran hasil tenun yang masih terbatas. Lalu dibentuklah sekolah tenun agar para perempuan penenun ini dapat terkoordinir dengan baik. Kelompok Nina Penenun (KNP) diresmikan 15 maret 2017 dan sudah memiliki program-program yang berjalan di lingkungan masyarakat, termasuk sekolah tenun. KNP pun merangkul semua penenun di desa, lalu melakukan pendampingan untuk meningkatkan

produktivitas kelompok dan regenerasi. Tak hanya itu, KNP juga berupaya untuk lebih meningkatkan inovasi produk, meningkatkan kualitas tenun, dan melakukan pemerataan harga melalui Perdes. Sebagai bentuk dukungan, Pemdes Pringgasela Selatan pun membuat galeri tenun dan menjadi pembina dalam pemasaran produk tenun. Beragam bentuk dukungan Pemdes ini pun telah tertuang dalam RKPdes Pringgasela Selatan.

Meskipun demikian, beberapa hal masih menjadi penghambat dalam upaya mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi dan SDGs Desa. Misalnya, masih banyak perempuan belum percaya diri untuk menyuarakan pendapatnya, belum adanya peguyuban untuk penyandang disabilitas/kelompok rentan lainnya di desa, kesempatan kerja minim, dan tingkat keterampilan warga yang masih rendah. Secara sosial, masih ada tantangan perempuan yang selalu dinomorduakan, dengan beban pekerjaan rumah tangga lebih banyak ditanggung oleh perempuan. Problem ini juga tak hanya dirasakan oleh perempuan di Desa Pringgasela Selatan, perempuan di Desa Oesena, Kab. Kupang, NTT pun kurang lebih menghadapi tantangan yang serupa.

Desa Oesena merupakan salah satu desa di Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berpenduduk kurang lebih 1.400 jiwa dan memiliki garis keturunan atau marga yang sama. Mata pencaharian penduduk Desa Oesena 90% merupakan petani dan peternak, sedangkan sisanya sebesar 10% bekerja di sektor pemerintahan dan swasta³⁰. Banyak hal yang sudah pemerintah desa Oesena lakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, Pemdes pernah

29 <https://www.suaralomboknews.com/2022/03/02/strategi-pengembangan-usaha-kain-tenun-untuk-meningkatkan-perekonomian-masyarakat-desa-pringgasela-selatan/>

30 <http://repository.ut.ac.id/8069/1/222-228%20Junus%20J.pdf>

membantu peralatan untuk membuat *stick* (pengolahan pangan). Tahun 2019, Pemdes pernah membuat kegiatan yang mengandeng forum perempuan desa dengan sedikit suntikan dana untuk mendukung kegiatan HUT RI di Desa Oesena. UMKM di Desa Oesena pun mendapatkan bantuan sebesar Rp. 600.000-Rp. 1.000.000. Namun demikian, penerima bantuan harus berulang kali diingatkan bahwa bantuan tersebut harus digunakan untuk usaha produktif, seperti membeli alat untuk pengolahan keripik atau yang lainnya. Jika tidak dijelaskan, maka bantuan-bantuan tersebut hanya akan habis untuk keperluan lainnya.

Bantuan dan pelatihan untuk tenun ikat, misalnya, juga bukanlah hal yang baru. Bantuan obat, benang, bantuan mesin jahit, bantuan warna alam juga sudah sering diberikan. Contoh, untuk kelompok tenun, biasanya UMKM meminta bantuan untuk pemasaran. Sehingga Pemdes mengadakan pelatihan menjahit kain tenun didesain dengan kain tokoh. Jadi, banyak bantuan yang datang. Untuk lansia, pada tahun 2019, hampir semua kepala keluarga diberi bantuan bibit ayam untuk ditenakan. Sayangnya, banyak bantuan, tapi kadang salah digunakan.

“Untuk mengentaskan kemiskinan, kedudukan perempuan dan laki-laki itu (harus) sama. Selama ini kita melihat perempuan dengan sebelah mata dan mengucilkan perempuan. Kalau kita tidak memberdayakan perempuan, maka nanti kemiskinan itu akan meningkat. Kita berusaha untuk mendorong perempuan agar setara dengan laki-laki”
(Kades Oesena)

Salah satu perempuan warga Oesena pun membenarkan. Ia bercerita pernah mendapat bantuan ayam kampung, seng, paku, dan lain-lain. Forum perempuan mendapatkan bantuan dari desa berupa ayam kampung untuk dikembangkan lagi. Pernah suatu ketika, ayam bantuan dari desa mati karena wabah penyakit, tetapi saat ada bantuan BLT, salah satu warga membeli bibit ayam kembali untuk dikembangkan. Sekarang ia pun sudah bisa menjual ayam lagi. Bumdes di Desa Oesena juga sudah mendapatkan dukungan dari Dana Desa dan ada tiga orang perempuan yang ikut mengelola Bumdes. Manfaatnya bisa membantu masyarakat, khususnya kios-kios yang membutuhkan sembako grosiran.

“Jadi kios-kios itu ambil langsung di Bumdes. Itu kerja sama yang terjadi selama ini. Usaha kios yang dilakukan itu juga paling banyak dilakukan (oleh) perempuan.”

Pemdes Oesena juga pernah bekerjasama dengan dinas pertanian untuk pemberdayaan kelompok tani di bidang pertanian. Pernah dibentuk kelompok wanita tani tanaman hortikultura. Perempuan tani ini mendapat suntikan dana untuk membuka usaha. Di sini ada kelompok tetapi yang mendapat dana baru satu orang dan sedang berjalan walaupun pernah terganggu karena Bencana Badai Seroja. Masyarakat masih belum banyak yang belum memahami bahwa bantuan yang diberikan itu harus dikelola kembali untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selain bantuan ternak ayam kampung dan hortikultura, Pemdes juga menyelenggarakan pelatihan tenun ikat, pemberian makanan tambahan untuk Ibu hamil dan anak-anak PAUD. Kelompok Forum

Perempuan bahkan dibantu dengan mesin pengolah kelapa. Untuk perempuan kepala rumah tangga, ada dua orang yang pernah diberikan bantuan rumah layak huni sebanyak 2 unit.

Menurut salah satu anggota BPD, perempuan sekarang sudah dilibatkan dalam berbagai kesibukan di desa. *"Itu kenyataan sekarang, kami punya anggota BPD perempuan dilibatkan dan mereka sangat aktif. Suara mereka didengar dan terlibat dalam pembuatan keputusan"*, imbuhnya. Biasanya saat rapat dengan BUMDes, anggota perempuan akan mengusulkan agar produk-produk BUMDes dapat ditingkatkan. Seperti barang-barang sembako diperbanyak supaya masyarakat tidak perlu jauh-jauh lagi untuk membeli kebutuhan kios. Perempuan sudah banyak yang melibatkan diri di pemerintah desa dan kelompok. Pempdes pun

bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan LSM untuk memberikan pelatihan kepada perempuan-perempuan desa. Ibu-ibu meminta agar desa melakukan pelatihan penghitungan kas, termasuk cara hitung akuntasinya. Menurut Kades Oesena, malahan suara kelompok perempuan sekarang ini melebihi suara laki-laki. *"Wanita-wanita kami di desa ini semuanya hebat. Usulan-usulan itu memang sudah banyak ada yang kami realisasikan lewat dana desa dan ada yang melalui kerja sama dengan pemerintah kabupaten, provinsi dan LSM"* ujar pak Kades Oesena.

Untuk penyandang disabilitas, sudah ada usulan untuk kursi roda, kacamata dan alat bantu lainnya. Pemerintah desa berpikir bahwa kebutuhan untuk kelompok disabilitas ini dapat diminta dari dinas sosial kabupaten Kupang yang memiliki program tersebut. Mereka



Gambar 14. FGD di Desa Oesena



Gambar 14. FGD di Desa Oesena

pun secara pro aktif bekerja sama dengan dinas terkait dengan meminta bantuan, baik dalam bentuk uang maupun barang (kursi roda), termasuk untuk kebutuhan pokok untuk penyandang disabilitas. Dari sisi pelaku usaha perempuan, keterampilan tenun nampaknya masih dibutuhkan.

“Biarpun beberapa lembar dalam sebulan tetapi sudah bisa menghasilkan. Saya dapat keuntungan dari jual kain tenun dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Saya juga pelihara babi dan ayam” (Mama Merpati, warga Oesena)

Para perempuan di desa Oesena memiliki perhatian khusus terhadap pewarisan keterampilan menenun ini. Mereka berkeyakinan, kalau keterampilan ini tidak diteruskan kepada anak, maka lama-lama ia akan punah. Ketika perempuan sudah tahu cara menenun, mereka diminat membentuk kelompok baru untuk dibina. Sehingga keterampilan tenun ini masih bisa berkelanjutan. “Itu yang kami pahami tentang pemberdayaan. Kalau kami sudah paham kami harus sampaikan lagi kepada orang lain”, ungkapnya.

Masalahnya, khusus untuk perempuan ini, mereka punya tugas menyusui anak dan mengurus rumah tangga. Kewajiban ini menyebabkan perempuan menjadi dibatasi atau tidak diperkenankan untuk menjadi salah satu pemimpin di Desa Oesena. “Malah perempuan

itu senang untuk bisa memimpin di desa, tetapi kadang-kadang suami (mereka) tidak setuju.” Diskriminasi seperti ini masih sering terjadi, dimana laki-laki menganggap perempuan kaum lemah. Mereka harus di belakang dan Bapak-bapak yang di depan. Padahal, banyak usaha yang dikelola oleh perempuan ini berhasil dan maju. *“Kita punya ibu-ibu cukup rajin. Kelemahan kita di desa, usaha tidak hanya satu. Kita usaha di sawah, kebun, marmer, ternak dan lainnya. Semua seperti sampingan. Mungkin kalau (salah satu) kita tekuni (secara serius) pasti lebih maju”.*

Peran BUMDes juga dianggap penting dalam membantu usaha yang dirintis perempuan di Desa Oesena. Misalnya, BUMDes membantu mencetak label untuk produk pangan mama-mama, lalu membantu menjual sepatu motif dari forum perempuan untuk dipasarkan. Ada VCO dan stick yang dijual oleh BUMDes. Untuk VCO, memang kendala utama adalah pada pemasaran. Fokus Pemdes untuk membantu

pemberdayaan ekonomi ini memiliki dampak positif bagi martabat dan kehidupan perempuan dan anak di desa Oesena.

Kasus perkawinan anak kini sudah tidak ada. Demikian pula dengan KDRT, ada 4 kasus yang berhasil diselesaikan di tingkat desa. Dulu juga pernah kasus kekerasan seksual dengan korban seorang anak berumur 13 tahun. Kasus tersebut terjadi pada tahun 2019. Kasus itu pun sampai di polisi dan pelakunya telah dihukum penjara. Dengan kata lain, jika perempuan di Desa ini semuanya berdaya dan mandiri, maka kemiskinan dan masalah rumah tangga lainnya juga akan berhasil untuk diatasi. Sebaliknya, mimpi membangun desa yang berdaya dan bebas dari kemiskinan, tidak akan pernah berhasil jika tidak melibatkan dan menempatkan perempuan sebagai elemen utamanya. Sebab, perempuan itulah *agent of change* di desa yang sebenarnya!

REFLEKSI KRITIS

Dari berbagai cerita dan pengalaman Desa-Desa yang tertulis dalam buku ini, setidaknya dapat kita tarik enam kesimpulan atau catatan kritis. *Pertama*, peran, partisipasi dan keterlibatan perempuan bukanlah sekedar pelengkap dalam pencapaian SDGs Desa, tetapi menjadi salah satu pilar utama yang tidak dapat dikesampingkan. Selain itu, “SDGs 5” bukanlah tujuan yang berdiri sendiri, tetapi melekat pada 17 tujuan SDGs Desa lainnya. Pelibatan perempuan sejak dalam perencanaan, pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi SDGs Desa adalah “wajib” hukumnya. Sebab, sebagaimana praktik baik dan pengalaman desa-desa di dalam buku ini, perempuan adalah pilar utama dalam proses pencapaian SDGs Desa yang tidak dapat dipandang sebelah mata peran dan kontribusinya.

Kedua, perlu diingat dan diperhatikan oleh para pengambil kebijakan, baik di tingkat desa maupun di pusat, bahwa kemajuan dalam mencapai satu tujuan SDGs dapat melahirkan dampak negatif pada tujuan SDGs lainnya (*progress towards one goal can have a negative impact on progress towards others*). Contoh “*trade-offs*” seperti ini banyak ditemukan dalam literatur hasil penelitian SDGs di Dunia maupun dalam prakteknya di dunia nyata. Perlu kebijaksanaan dalam menentukan prioritas SDGs Desa yang akan dicapai. Jangan sampai semangat dalam mencapai salah satu tujuan SDGs Desa, justru membawa dampak buruk bagi pencapaian tujuan SDGs yang lainnya.

Ketiga, secara metodologis, penting untuk menggunakan pendekatan *place-based*

community research untuk memetakan keterhubungan antar indikator SDGs, karena setiap Desa berangkat dari titik yang berbeda. Pendalaman perlu dilakukan kasus per kasus, program per program, dengan menempatkan proses sebagai narasi utama dalam pencapaian target SDGs. Buku ini mencoba mengangkat berbagai narasi berbasis spesifik tempat tersebut agar dapat menjadi contoh bahwa dalam setiap proses pasti tidak ada yang sempurna. Terkadang bukan soal hasil atau targetnya yang terpenting, melainkan komitmen dan kesabaran dalam berproses juga menjadi sesuatu yang patut untuk diapresiasi.

Keempat, adaptasi atau pelokalan SDGs Desa tidak cukup dengan hanya menurunkan beragam indikator SDGs Global atau Nasional ke level Desa. Lebih dari itu, perlu memasukkan faktor, variabel, atau dimensi lain yang relevan. Misal, dimensi politik lokal, kepemimpinan desa, struktur dan kelembagaan informal yang berpengaruh, jejaring perempuan, praktek hidup dan perilaku sehari-hari, *mindset*, dan lain sebagainya. Dengan karakteristik lokal desa-desa Indonesia yang beragam, maka akan lebih adil jika basis evaluasi SDGs Desa juga tidaklah diseragamkan, tetapi mengandung muatan lokal atau “bobot nilai” yang berbeda antara satu desa dengan desa lainnya.

Kelima, implementasi SDGs pasti berhadapan dengan banyak masalah dan tantangan, baik masalah baru maupun masalah laten yang sudah eksis di Desa selama bertahun-tahun. Desa harus fokus pada kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*). Pengambil kebijakan –

dari pusat hingga level desa – dan warga harus jeli dalam melihat kekuatan dan peluang, lalu menjadikannya sebagai modal untuk mencapai target SDGs yang menjadi prioritas bersama. Kolaborasi dan kemitraan dengan pihak-pihak di dalam maupun dari luar desa perlu terus dipupuk agar desa tetap dinamis, terbuka, dan adaptif terhadap berbagai potensi perubahan di masa mendatang. Sebab, layaknya negara-negara di dunia yang tidak dapat hidup sendiri, pada suatu titik, desa-desa di Nusantara ini juga akan saling bergantung satu sama lain.

Keenam, praktek baik SDGs Desa di sepuluh

desa telah menunjukkan bahwa SDGs Desa berkontribusi kepada pencapaian prioritas program pemerintah, seperti penurunan stunting, penurunan Kekerasan Berbasis Gender, toleransi dan kerukungan serta penurunan kemiskinan ekstrem. Pendekatan proses kemudian penting untuk diperluas dan diterapkan kepada implementasi SDGs Desa di 83.000 desa di Indonesia. Sehingga kontribusi SDGs Desa kepada pencapaian SDGs Nasional dan Program Prioritas Pemerintah dapat lebih terpetakan dengan baik, termasuk inisiatif-inisiatif di Desa yang sebelumnya telah berjalan jauh sebelum pelaksanaan SDGs Desa dimulai.

LAMPIRAN

Tabel 4. Tipe desa, tujuan, dan indikator SDGs Desa (kuantitatif)

No	Tipe Desa Menurut SDGs Desa	Tujuan SDGs Desa	Indikator SDGs Desa
1	Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kemiskinan desa mencapai 0% 2. Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan mencapai 100% 3. Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100% 4. Keluarga miskin mendapat layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan hunian layak mencapai 100% 5. Keluarga miskin korban bencana yang ditangani mencapai 100%
		2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prevalensi kurang gizi, kurus, stunting, anemia turun menjadi 0% 2. Prevalensi bayi mendapat ASI eksklusif mencapai 100% 3. Ada kawasan pertanian pangan berkelanjutan
2	Desa ekonomi tumbuh merata	8	<ol style="list-style-type: none"> 1. PDB Desa rata-rata di atas Rp 30 juta 2. Pekerja sektor formal minimal 51% 3. Terdapat akses permodalan formal, dan UMKM mendapat aksesnya 4. Tingkat pengangguran terbuka 0% 5. PKTD menyerap >50% penganggur di desa 6. Angkatan kerja baru yang dilatih mencapai 100% 7. Tempat kerja memiliki fasilitas kesehatan dan keamanan mencapai 100% 8. Wisatawan meningkat, dan kontribusi wisata mencapai 8% PDB Desa
		9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan kondisi baik mencapai 100% 2. Dermaga/tambatan perahu kondisi baik mencapai 100% 3. Laju pertumbuhan industri rumah tangga, kecil dan menengah di atas pertumbuhan PDB Desa 4. Kontribusi industri pengolahan 8% PDB Desa 5. Industri yang mencemari udara mencapai 0%
		10	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koefisien Gini desa di bawah 0,200 2. Tingkat kemiskinan 0% 3. Status perkembangan desa A (setara mandiri) 4. Indeks kebebasan sipil mencapai skor 100 5. Jumlah pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 100% 6. Tersedia perdes/SK Kades tentang advokasi pekerja migran
		12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Perdes/SK Kades tentang kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran dan pengelolaan limbah serta sampah rumah tangga 2. Tersedia unit pengolah sampah

No	Tipe Desa Menurut SDGs Desa	Tujuan SDGs Desa	Indikator SDGs Desa
3	Desa peduli kesehatan	3	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPJS Kesehatan mencapai 100% penduduk 2. Unmet need pelayanan kesehatan mencapai 0% 3. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan menggunakan tenaga kesehatan terampil mencapai 100% 4. Angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup mencapai 0 5. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup mencapai 0 6. Imunisasi dasar lengkap pada bayi mencapai 100% 7. Prevalensi HIV, TBC, tekanan darah tinggi, obesitas, narkoba mencapai 0% 8. Jumlah RT yang menjalankan eliminasi malaria, kusta, filariasis (kaki gajah) mencapai 100% 9. Persentase perokok <18 tahun mencapai 0% 10. Posyandu yang menangani kesehatan jiwa pada 100% RT 11. Korban penyalahgunaan NAPZA (narkoba) 100% ditangani panti rehabilitasi sosial 12. Korban mati dan luka berat akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 0% 13. Prevalensi pemakaian kontrasepsi jangka pendek dan jangka panjang pada orang menikah usia produktif (usia 18-49 tahun) mencapai 100% 14. Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) mencapai 0% 15. Total Fertility Rate (TFR) di bawah 1,5.
		6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses terhadap layanan air minum dan sanitasi layak mencapai 100% keluarga 2. Keluarga dan industri yang dilayani air baku mencapai 100% 3. Keluarga dan industri pengguna fasilitas air limbah dan lumpur tinja mencapai 100% 4. Kualitas sumber air tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa di seluruh RT 5. Terdapat perdes/SK Kades tentang penggunaan air tanah, tata kelola sumber daya air 6. Pengurangan ongkos air irigasi pada industri bagi yang menerapkan air limbah yang aman untuk pertanian 7. Tersedianya perdes/SK Kades pelestarian lingkungan di sekitar aliran sungai 8. Tersedianya informasi dari stasiun hidrologi dan klimatologi terdekat 9. Tersedianya informasi sumber daya air 10. Jumlah mata air tetap (tidak berkurang) 11. Terdapat kegiatan penanaman pohon disekitar aliran dan pengerukan sungai serta danau 12. Air danau dan sungai tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa 13. Tidak ada lahan tandus dan erosi
		11	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah kumuh mencapai 0% 2. Pengamanan dilaksanakan di 100% RT 3. Keluarga, orang tua, perempuan dan difabel pengguna moda transportasi umum >50% 4. Penduduk yang pindah ke kota <15% 5. Swasta dan organisasi kemasyarakatan cangkrukan untuk pembangunan desa 6. Budaya yang dilestarikan mencapai 100% 7. Indeks resiko bencana (IRB) seluruh RT mencapai 0% 8. Tersedia peringatan dini bencana 9. Terdapat pengolahan sampah dan Penanganan sampah keluarga mencapai 100% 10. Terdapat taman/lapangan di desa

No	Tipe Desa Menurut SDGs Desa	Tujuan SDGs Desa	Indikator SDGs Desa
4	Desa peduli lingkungan	7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga pengguna listrik mencapai 100%, dengan konsumsi >1.200 kWh/kapita 2. Keluarga pengguna gas atau sampah kayu untuk memasak mencapai 100% 3. Pengguna bauran/campuran energi terbarukan mencapai 60% keluarga 4. Keluarga pengguna minyak untuk transportasi dan memasak <50%
		13	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Risiko Bencana (IRT) mencapai 0 di seluruh RT 2. Penanganan/mitigasi risiko bencana mencakup 100% terhadap peluang kebencanaan tiap RT
		14	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia perdes/SK Kades tentang tata ruang desa dan perlindungan sumberdaya laut 2. Penangkapan ikan meningkat secara wajar (tidak eksploitatif) sesuai jenis ikan 3. Luas kawasan konservasi perairan minimal 33% dari luas desa 4. Tidak ada illegal fishing
		15	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia perdes/SK Kades tentang pelestarian keanekaragaman hayati 2. Luas kawasan lahan terbuka minimal 33% dari luas desa 3. Luas lahan hutan rusak dan lahan kritis di hutan mencapai 0%, pemanfaatan kayu dari hutan yang direstorasi 4. Peningkatan satwa yang terancam punah >50% 5. Perusak lingkungan yang dipidana mencapai 100%
5	Desa peduli pendidikan	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses anak ke SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA terakreditasi minimal B mencapai 100% 2. Akses anak ke pesantren mencapai 100% 3. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA mencapai 100% 4. Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA laki-laki dan perempuan mencapai 100% 5. Angka melek aksara latin dan non latin pada penduduk usia di atas 15 tahun mencapai 100% 6. Rata-rata lama sekolah penduduk >20 tahun mencapai 12 tahun 7. Tersedia Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan
6	Desa ramah perempuan	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perdes/SK Kades yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan minimal 30% 2. Terdapat perdes/SK Kades yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. 3. Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan mencapai 0% 4. Kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif mencapai 100% 5. Median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) di atas 18 tahun 6. Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) mencapai 0% 7. APK SMA/SMK/MA/ sederajat mencapai 100% 8. Persentase jumlah perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa minimal 30% 9. Persentase jumlah perempuan yang menghadiri musdes dan berpartisipasi dalam pembangunan desa minimal 30% 10. Unmet need kebutuhan ber-KB mencapai 0%, dan Pasangan Usia Subur (PUS) memahami metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis

No	Tipe Desa Menurut SDGs Desa	Tujuan SDGs Desa	Indikator SDGs Desa
7	Desa berjejaring	17	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB Desa di atas 12% per tahun 2. Terdapat kerja sama desa dengan desa lain, pihak ketiga, dan lembaga internasional 3. Tersedia jaringan internet tetap (wifi) dan mobile (handphone) berkecepatan tinggi 4. Komoditas desa yang diekspor meningkat 46 5. Informasi kondisi sosial dan ekonomi desa dapat diakses publik 6. Tersedia data statistik desa setiap tahun, aplikasi statistik dan petugas bidang statistik di desa 7. Tersedia data SDGs setiap tahun
8	Desa tanggap budaya	16	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kriminalitas, perkelahian, KDRT, kekerasan terhadap anak mencapai 0% 2. Terselenggara gotong royong antar penduduk berbeda agama, ras, golongan 3. Pekerja anak mencapai 0% 4. Perdagangan manusia mencapai 0% 5. Tersedia layanan hukum untuk orang miskin, orang miskin yang memperoleh bantuan hukum mencapai 0% 6. Proses pengadaan barang dan jasa terbuka untuk publik 7. Laporan pertanggungjawaban Kades dan laporan keuangan diterima dalam Musdes 8. SOTK pemerintahan desa sesuai peraturan yang berlaku 47 9. Tingkat kepuasan pelayanan pemerintah desa tinggi 10. Perempuan dalam BPD dan perangkat desa mencapai minimal 30% 11. Indeks lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak politik mencapai 100 12. Cakupan kepemilikan akta kelahiran 100% 13. Penanganan terhadap aduan pelanggaran karena suku, agama, ras, dan golongan mencapai 100% 14. Dokumen perencanaan dan keuangan desa dapat diakses publik, disediakan dalam waktu sehari, dan seluruh pengaduan informasi ditangani
		18	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan tolong menolong yang didasarkan pada ajaran agama 2. Tokoh agama berpartisipasi dalam musyawarah desa (musdes) dan implementasi pembangunan desa 3. Terdapat kegiatan santunan/pemeliharaan anak yatim dan orang miskin 48 4. SOTK pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 5. Pelaksanaan musdes minimal 4 kali setahun 6. Tersedia dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDes 7. Tersedia peta batas desa yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota 8. Bumdes/ma terakreditasi minimal B 9. Budaya yang dilestarikan mencapai 100%, lembaga adat aktif 10. Penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan budaya >50% 11. Aset desa meningkat 12. Lembaga kemasyarakatan desa yang ikut musdes >30%

DAFTAR PUSTAKA

- [1] United Nations, "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development." 2015.
- [2] Bappenas, "LAPORAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM INDONESIA 2010." Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2010.
- [3] M. Fehling, B. D. Nelson, and S. Venkatapuram, "Limitations of the Millennium Development Goals: a literature review," *Global Public Health*, vol. 8, no. 10, pp. 1109–1122, Dec. 2013, doi: 10.1080/17441692.2013.845676.
- [4] A. H. Iskandar, *SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Buku Obor, 2020.
- [5] G. Johnsson-Latham, "A study on gender equality as a prerequisite for sustainable development." 2007.
- [6] Equal Measures 2030, "2022 SDG Gender Index: Back to normal is not enough." Equal2030, 2022.
- [7] Kemen PPPA RI, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), 2020.
- [8] Bappenas, *Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender (IKKG) & Indikator Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (IKPUG): Kajian Awal*. Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kedeputusan Bidang Sumber Daya Manusia, 2012.
- [9] UNDP, Ed., *The next frontier: human development and the Anthropocene*. New York, NY: United Nations Development Programme, 2020.
- [10] WEF, "Global Gender Gap Report 2021: INSIGHT REPORT MARCH 2021." World Economic Forum Centre for the New Economy and Society, 2021.
- [11] OECD, "SIGI 2019 Global Report: Transforming Challenges into Opportunities." Organisation for Economic Co-operation and Development, 2019.
- [12] M. F. Mbah and L. A. East, "How Can 'Community Voices' from Qualitative Research Illuminate Our Understanding of the Implementation of the SDGs? A Scoping Review," *Sustainability*, vol. 14, no. 4, p. 2136, Feb. 2022, doi: 10.3390/su14042136.
- [13] C. R. Farnworth, L. B. Badstue, H. de Groote, and Z. Gitonga, "Do metal grain silos benefit women in Kenya, Malawi, Zambia and Zimbabwe?," *Journal of Stored Products Research*, vol. 93, p. 101734, Sep. 2021, doi: 10.1016/j.jspr.2020.101734.

- [14] A. H. Lasso and H. Dahles, "A community perspective on local ecotourism development: lessons from Komodo National Park," Jul. 2021, doi: <https://doi.org/10.1080/14616688.2021.1953123> .
- [15] M. de Onis and F. Branca, "Childhood stunting: a global perspective: Childhood stunting: a global perspective," *Maternal & Child Nutrition*, vol. 12, pp. 12–26, May 2016, doi: 10.1111/mcn.12231.
- [16] A. J. Prendergast and J. H. Humphrey, "The stunting syndrome in developing countries," *Paediatrics and International Child Health*, vol. 34, no. 4, pp. 250–265, Nov. 2014, doi: 10.1179/2046905514Y.00000000158.
- [17] T. Beal, A. Tumilowicz, A. Sutrisna, D. Izwardy, and L. M. Neufeld, "A review of child stunting determinants in INDONESIA," *Matern Child Nutr*, vol. 14, no. 4, p. e12617, Oct. 2018, doi: 10.1111/mcn.12617.
- [18] H. Aplin, "GAMBARAN PERKEMBANGAN BALITA STUNTING DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KALIBAWANG KULONPROGO YOGYAKARTA," Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, Yogyakarta, 2019.
- [19] S. Fatimah, "HUBUNGAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DAN PENDAPATAN KELUARGA DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA BALITA USIA 24-59 BULAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KALIBAWANG KULON PROGO," p. 20, 2020.
- [20] N. John, S. E. Casey, G. Carino, and T. McGovern, "Lessons Never Learned: Crisis and gender based violence," *Developing World Bioeth*, vol. 20, no. 2, pp. 65–68, Jun. 2020, doi: 10.1111/dewb.12261.
- [21] Komnas Perempuan, "Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022." Komnas Perempuan, 2022.
- [22] I. G. A. A. Mahendra, A. W. Pinandari, I. Choiriyah, and S. A. Wilopo, "Are We Passing on Violence to the Next Generation?: Gender Norms and Gender-based Violence Attitudes among Early Adolescents in Indonesia," *Kesmas: National Public Health Journal*, vol. 16, no. 4, Nov. 2021, doi: 10.21109/kesmas.v16i4.4538.
- [23] D. Setyawati, "Assets or Commodities? Comparing Regulations of Placement and Protection of Migrant Workers in Indonesia and the Philippines," p. 18, 2013.
- [24] L. C. Sebastian and A. R. Arifianto, "TRaNS special section on 'Growing Religious Intolerance in Indonesia,'" *TRaNS*, vol. 8, no. 1, pp. 1–5, May 2020, doi: 10.1017/trn.2020.1.
- [25] K. E. Schulze and Associate Professor at the London School of Economics, the United Kingdom, "From Ambon to Poso: Comparative and Evolutionary Aspects of Local Jihad in Indonesia," *CSEA*, vol. 41, no. 1, pp. 35–62, Apr. 2019, doi: 10.1355/cs41-1c.



NGO in Special Consultative Status
with the Economic and Social Council of the United Nations, Ref. No: D1035

Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540
021 7819734, 7819735 | info@infid.org | www.infid.org

Follow Us:

